



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NTT**

2018 - 2023



Kupang, 2021



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 43A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 44A yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan
pada tanggal 17 Februari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
K/PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 014

Lampiran : II
Nomor : BP4D.050.13/Pev. /01/2021

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN
(RENSTRA - P) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018 - 2023

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Lima, Bulan Pebruari Tahun dua ribu dua puluh satu secara virtual yang di fasilitasi oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah diselenggarakan Proses Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Perubahan (RENSTRA - P) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 yang membahas usulan Program, Kegiatan Pagu Anggaran sesuai dengan Target, Program, Sasaran, Indikator dan Pagu RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta online dalam Lamipran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pengantar yang disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Pelaksanaan verifikasi RENSTRA-P Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
3. Hasil RENSTRA - P Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

MENYEPAKATI

- KESATU** : Menyepakati kesesuaian Target, Program, Sasaran, Indikator serta Pagu yang telah ditetapkan pada RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Menyepakati IKU Perangkat Daerah pada RENSTRA-P Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
- KETIGA** : Menyepakati Hasil Pembahasan RENSTRA-P Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 untuk proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan RENSTRA – P Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023.

Kupang, 5 Pebruari 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, *a*



Wayan Darmawa
Ir. Wayan Darmawa, MT
NIP. 19620505 198603 1 041

Kepala Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bappelitbangda Provinsi NTT selaku Verifikator Renstra – P PD,

Alfonsus Theodorus
DR. Ir. Alfonsus Theodorus, MT
NIP.197401191999031004



Koentjoro LANA
Mengetahui
KEPALA BAPPEDITBANGDA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KOENTJORO LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN XXIII : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**
NOMOR : **14** TAHUN 2021
TANGGAL : **19** Februari 2021

RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis merupakan dokumen panduan pelaksanaan urusan pemerintah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan acuan sistematika penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai target dan indikator yang ditentukan hingga waktu akhir pencapaian di tahun 2023.

Kupang, 2021
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Dr. Ir. WAYAN DARMAWA, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19620505 198603 1 041

DAFTAR ISI

COVER	i
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB)	ii
BERITA ACARA	v
LAMPIRAN RENSTRA	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	9
2.1. TUPOKSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH	9
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	19
2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI (CAPAIAN KINERJA)	22
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	30
3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	32
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	34
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	37

3.5. TELAAHAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (DPP)	
LABUAN BAJO	39
3.6. TELAAHAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO	
FLORES (BPOLBF)	41
3.7. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	44
4.2. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	52
5.1. STRATEGI	52
5.2. KEBIJAKAN	68
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	118
BAB VIII PENUTUP	120

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2020	19
Tabel. 2.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama Keadaan 31 Desember 2020	20
Tabel. 2.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional Keadaan 31 Desember 2020	20
Tabel.2.4. Komposisi PNS pada Subdin/Bagian Keadaan 31 Desember 2020	20
Tabel. 2.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Keadaan 31 Desember 2020	20
Tabel 2.6. Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2020	21
Tabel 2.7. Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020	22
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	25
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur	27
Tabel.2.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020	28
Tabel 3.1. Kerangka Kerja Logis Renstra Kementerian Pariwisata Periode Tahun 2020-2024	34
Tabel 3.2. Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata (Periode 2020-2024) dan Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT (2021-2023)	35
Tabel 3.3. Luasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Provinsi Ntt Tahun 2010-2030	38
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ..	48
Tabel 5.1. Analisis IFE	55
Tabel 5.2. Analisis EFE	56
Tabel 5.3. Matriks IE	57

Tabel 5.4. Analisis SWOT	58
Tabel 5.5 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2023	70
Tabel 6.1. Keterkaitan Program dan Upaya Mewujudkan Misi Kedua	84
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	92
Tabel 7.1. Indikator kinerja Perangkat Daerah	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan RTRW	3
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	11
Gambar 4.1. Cascading Tujuan dan sasaran RPJMD dan Tujuan PD	44
Gambar 4.2. Cascading sasaran RPJMD dan Sasaran PD	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk mencapai dan mewujudkan cita-cita bangsa yakni sebagai bangsa yang mandiri, adil dan makmur. Semakin penting di dalam pembangunan secara keseluruhan, karena industri ini dapat memberikan kontribusi yang semakin signifikan bagi pertumbuhan ekonomi domestik dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, serta memiliki kemampuan *primary mover* dan *multyplier effect* dengan sifatnya yang *multidimensi*. Di samping itu, pariwisata juga merupakan industri yang dapat menyerap tenaga kerja terbesar serta ramah terhadap lingkungan (pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan). Pertumbuhan dan perkembangan industri ini hanya dapat tersaingi dengan industri telekomunikasi dan transportasi. Dalam tataran ekonomi global, revolusi ITT (*Investment, Trade and Tourism*) akan sangat memberi pengaruh yang signifikan bagi perkembangan ekonomi wilayah. Revolusi ITT tersebut telah mendorong berbagai negara untuk mengembangkan Industri Kreatifnya agar dapat bertahan dari terpaan globalisasi serta mengembangkan kepariwisataan sebagai usaha kemajuan perekonomian bangsanya. Upaya ini dilakukan berbagai negara, tak terkecuali Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan industri kreatif dan pariwisata sebagai salah satu andalan pemerintah dalam pemulihan krisis multi dimensi dan penghasil devisa terbesar bagi negara.

Berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka industri ini merupakan fenomena global yang telah membawa perubahan besar dan mendasar terhadap tatanan sosial budaya dan ekonomi dunia. Pemahaman terhadap industri pariwisata tidak dapat dilepaskan dari konsep *leisure* (waktu luang). *Leisure*, bukan sekedar “waktu luang” non-produktif, melainkan *leisure* pada dirinya mengandung domain eksistensial, domain sosial dan domain ekonomi. Secara eksistensial *leisure* merupakan sarana universal pemenuhan kebutuhan manusia akan kesejahteraan spiritual, emosional, mental dan sosial. Dalam hal demikian, *leisure* merupakan kondisi yang mendasar bagi upaya kreatif individu dan proses peradaban (sivilisasi). Untuk maksud itu, *leisure*

memungkinkan setiap orang untuk menikmati waktu senggang *rest and recreation* sebagai sarana *refreshment* (penyegaran). Dengan perkataan lain, *leisure* adalah sarana penyegaran psikologis, emosional, mental dan sosial. Karenanya *leisure* mengandung “kualitas hidup berkelanjutan” (*refresh life*) sebagai hak eksistensial. Bahwa *refreshment* melekat pada kehidupan secara eksistensial.

Pemahaman terhadap *leisure* dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi. Sebagai aspek sosial, *leisure* merupakan hak bersama dan pemanfaatannya dalam rangka penyegaran sosial terhadap hak-hak cuti yang diberikan. Sebagai aspek ekonomi konsep *leisure* dapat dijadikan peluang ‘pasar’ yang melibatkan berbagai pelaku ekonomi dan sangat berpengaruh pada infrastruktur, jaringan dan jasa.

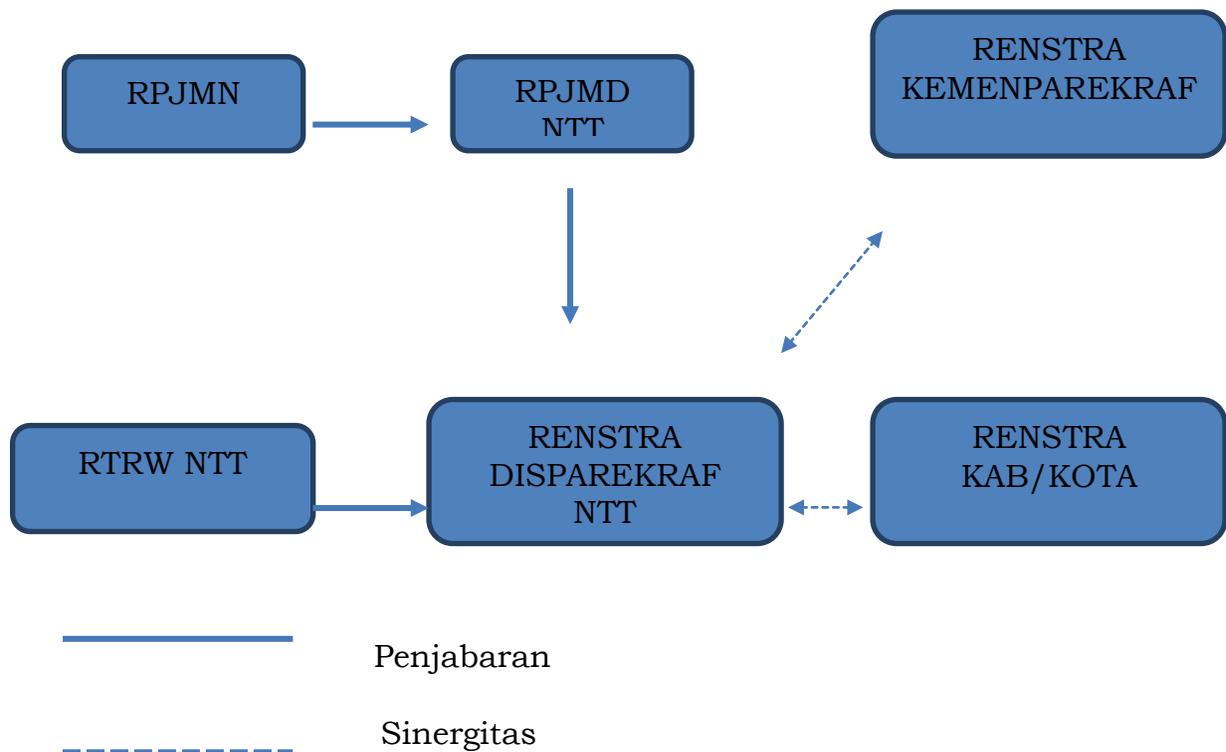
Gambaran di atas memperlihatkan bahwa industri pariwisata adalah suatu fenomena global dan kompleks yang bermula dari konseptualisasi “waktu luang” (*leisure*), digerakkan oleh proses industrialisasi. Dengan perkataan lain, industri pariwisata merupakan salah satu wujud dari industri “waktu luang”. Bahwa proses industrialisasi sejalan dengan tingkat perkembangan peradaban (sivilisasi) dan berimplikasi pada kesejahteraan manusia. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu masyarakat, semakin tinggi pula kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Kelompok masyarakat yang telah mengalami proses industrialisasi “waktu luang” menandakan tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi. Pembangunan kepariwisataan dalam strategi pembangunan nasional diarahkan sebagai andalan penghasil devisa. Jumlah perolehan devisa ditentukan oleh jumlah kunjungan (*foreign tourist*), lama tinggal (*length of stay*) dan jumlah pembelanjaan/pengeluaran wisatawan (*expenditures*).

Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya selama lima (5) tahun. Sebagai bentuk implementasi amanat peraturan perundang-undangan dalam mengawal Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama lima (5) tahun sesuai arah dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

bertanggungjawab terhadap pencapaian indikator misi ke-2 RPJMD sebagai Penggerak Utama (*Prime mover*) sektor ekonomi dengan dampak yang diharapkan adalah peningkatan ekonomi masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.

Pada tahun ke-2 pelaksanaan RENSTRA, terjadi perubahan regulasi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 sebagai panduan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) wajib melakukan revisi berupa penyesuaian terhadap perubahan arah pembangunan yang digunakan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif pada masa sisa pelaksanaan RPJMD. Keterkaitan antar dokumen regulasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan RTRW



Perubahan RPJMN terhadap tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga dalam hal ini yang terkait secara substansi adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, target dan sasaran kementerian yang diperbaharui diselaraskan dengan kebijakan daerah melalui visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam bentuk perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk merumuskan target keluaran program dan kegiatan yang akan dicapai hingga akhir tahun RPJMD Provinsi NTT pada tahun 2023. Dalam menyusun arah kebijakan RENSTRA memperhatikan RTRW sebagai pedoman kewilayahan dan lingkungan, RENSTRA Kab/Kota sebagai acuan sinergitas kolaborasi dengan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif pemerintah daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018-2023 mengacu dan memperhatikan dasar hukum :

- 1) Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan;
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58;

- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- 11) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah;

- 25) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Lembaran Daerah Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0116;
- 26) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
- 28) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
- 29) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2018 – 2023 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan dan merencanakan program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif yang sudah disesuaikan dengan dokumen perubahan RPJMD;
- 2) Merumuskan kembali strategi dalam pencapaian indikator Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

1.3.2. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT disusun dengan tujuan :

- 1) Menyesuaikan perubahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- 2) Menjadi pedoman resmi bagi pemerintah dan pihak lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
- 3) Menjadi pedoman Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;
- 4) Menjadi acuan pembangunan dan pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi pemerintah kabupaten/kota;
- 5) Menjadi tolok ukur dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja pembangunan daerah di bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 6) Memberikan gambaran umum tentang kondisi kekinian bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam lingkup regional dan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

a) BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Perubahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

b) BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pencapaian target dan sasaran RENSTRA tahun 2019-2020.

c) BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan – Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pencapaian hingga tahun 2020.

d) BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

e) BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

f) BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

g) BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h) BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1. TUPOKSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, yang secara struktur memiliki organisasi sebagai berikut :

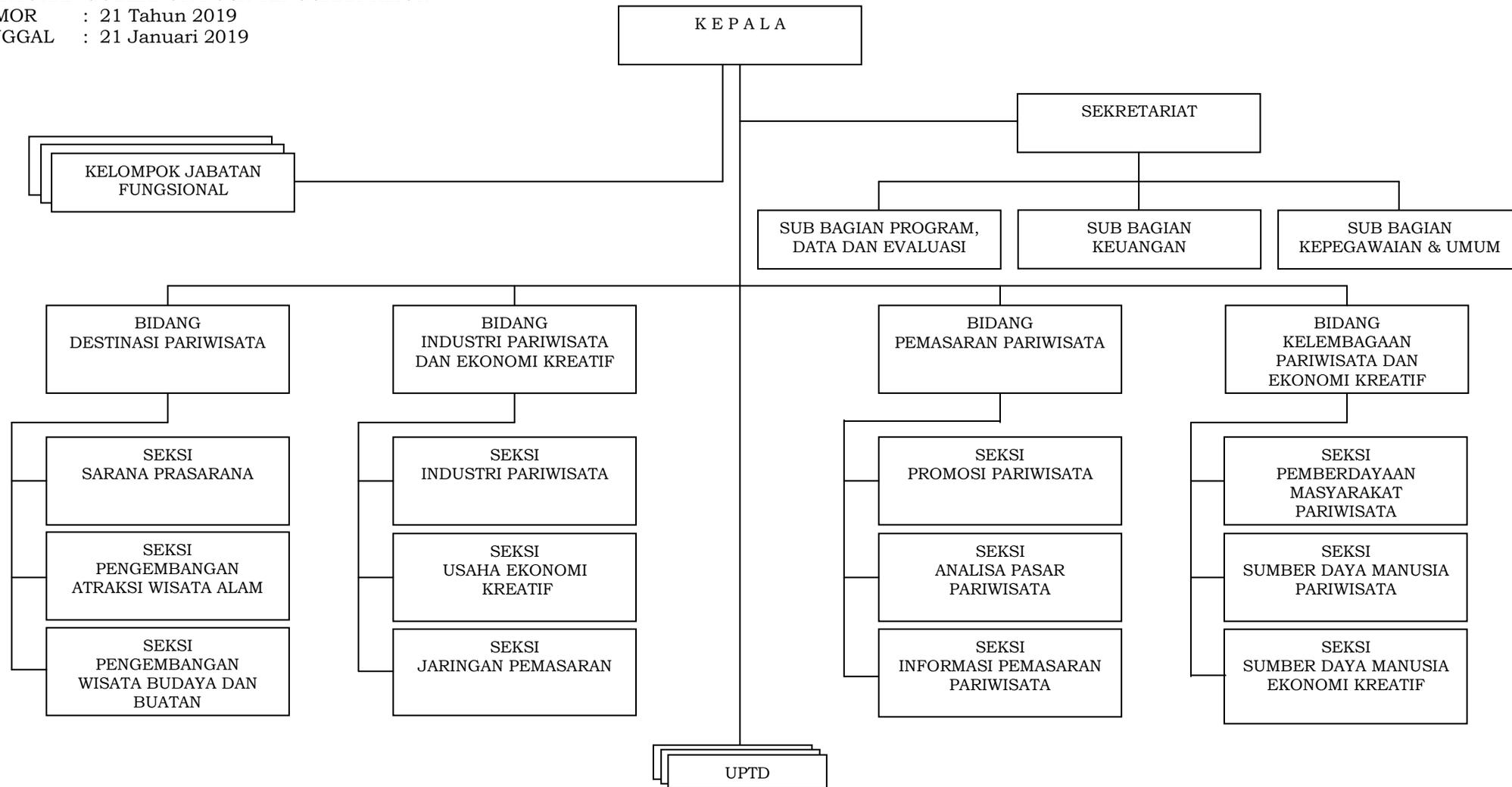
- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c) Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - 2) Bidang Destinasi Pariwisata;
 - 3) Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Bidang Kelembagaan Pariwisata.

Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu :

1. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas:
 - a) Seksi Informasi Pemasaran Pariwisata;
 - a) Seksi Promosi Pariwisata;
 - b) Seksi Analisa Pasar Pariwisata.
2. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas:
 - a) Seksi Sarana Prasarana;
 - b) Seksi Pengembangan Atraksi Wisata Alam;
 - c) Seksi Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan.
3. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreati terdiri atas:
 - a) Seksi Industri Pariwisata;
 - b) Seksi Usaha Ekonomi Kreatif;
 - c) Seksi Jaringan Pemasaran.
4. Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
 - b) Seksi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;
 - d) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar. 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif digambarkan dalam bagan berikut:

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 21 Tahun 2019
 TANGGAL : 21 Januari 2019



Tugas dan fungsi masing-masing struktur diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas (Eselon IIA)

Merumuskan program kerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kesekretariatan, destinasi pariwisata, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif serta unit pelaksana teknis pengelolaan pariwisata berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pengembangan pariwisata dan percepatan pertumbuhan pariwisata untuk terwujudnya *the new tourism territory*.

Uraian tugas:

- a Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah sertamasukan dari komponen masyarakat untuk memberikan pelayanan pariwisata yang professional;
- b Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 tentang RIPPAPROV dan rencana strategis (Renstra) dan Menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan Dinas;
- c Merumuskan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bidang Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d Merumuskan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk teknis bidang pariwisata berdasarkan kebijakan nasional dan daerah guna optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pariwisata di daerah;
- e Menyusun rencana pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang berbasis kinerja dalam rangka tersedianya aparatur yang berkompeten di bidangnya;
- f Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- g Mengelola dan mempertanggungjawabkan aset unit sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;

- h Melaksanakan koordinasi program/kegiatan dengan instansi/pihak terkait lainnya;
- i Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan berdasarkan rencana kerja;
- j Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan Budaya Kerja, Pengendalian Internal, Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP), LKPJ, LPPD, laporan Keuangan dan laporan Kinerja lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- k Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- l Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja;
- m Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Uraian tugas:

- a Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi Program Data dan Evaluasi, Keuangan dan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar tersedia program kerja yang partisipatif;

- f Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- g Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawabandan masukan bagi atasan;
- h Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- i Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya ASN yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- j Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan destinasi pariwisata yang meliputi sarana dan prasarana, atraksi daya tarik wisata dan pengembangan wisata budaya dan buatan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Uraian tugas :

- a Merencanakan langkah- langkah operasional kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b Mendistribusi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c Merumuskan petunjuk teknis bidang destinasi pariwisata yang mencakup penatakelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta pengembangan wisata budaya, alam, dan buatan;
- d Mengarahkan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- e Melaksanakan kebijakan di bidang penatakelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta

- pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan;
- f Meningkatkan kualitas dan kuantitas potensi obyek dan daya tarik wisata serta atraksi;
 - g Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata;
 - h Melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dengan kabupaten /kota;
 - i Melaksanakan bimbingan dan supervisi di bidang penata kelolaan sarana prasarana pariwisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata serta pengembangan wisata alam, budaya, dan buatan;
 - j Melakukan penyusunan e-literasi destinasi wisata provinsi;
 - k Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
 - l Melaksanakan administrasi Bidang Destinasi Pariwisata dan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - m Melakukan koordinasi/konsultasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
 - n Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Destinasi Pariwisata serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
 - o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan ekonomi kreatif bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan pemasaran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Uraian Tugas:

- a Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan criteria berkaitan dengan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
- h Mengendalikan pelaksanaan kegiatan produk dan jasa sektor industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
- i Memberikan bimbingan dan supervisi di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk perumusan kebijakan;
- l Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, professional dan bermoral;
- m Melakukan koordinasi /konsultasi tugas dengan instansi lintas sektor;
- n Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta laporan tugas kedinasan lainnya;
- o Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran pariwisata yang meliputi promosi pariwisata, analisa pasar dan informasi pemasaran pariwisata berdasarkan segmen pasar personal,

kerjasama internasional dan klaster pemasaran untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Uraian tugas:

- a Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemasaran pariwisata berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi promosi pariwisata, analisa pasar, dan informasi pariwisata sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan pemasaran pariwisata untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- f Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- g Melaksanakan core dan major event dalam maupun luar negeri;
- h Memberikan bimbingan dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata;
- i Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan pemasaran pariwisata;
- j Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemasaran pariwisata untuk perumusan kebijakan;
- k Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
- l Melakukan koordinasi/konsultasi tugas dengan instansi lintas sektor agar terjalin kerjasama;
- m Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Pemasaran Pariwisata serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja;
- n Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata (Eselon IIIA)

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi sumber daya manusia pariwisata, sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan mutu usaha pariwisata dan profesionalisme sumber daya manusia kepariwisataan.

Uraian tugas :

- a Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c Menyiapkan bahan /konsep pembinaan dan petunjuk teknis kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan mutu usaha pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk fasilitasi kepemilikan hak paten dan hak intelektual, standarisasi, sertifikasi, kompetensi, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat pariwisata;
- e Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f Melaksanakan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN dan PPPK) yang handal, profesional dan bermoral;
- h Melakukan koordinasi tugas dengan instansi lintas sektor dan pihak terkait agar terjalin kerjasama yang baik;
- i Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan;
- j Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Kelembagaan

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta laporan tugas kedinasan tugas lainnya;

- k Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia (ASN)

Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Komposisi Pegawai berdasarkan Gol/Ruang Keadaan 31 Desember 2020

NO	GOL/RUANG	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1	Gol. IV/e	-	-	-	
	Gol. IV/d	1	-	1	
	Gol. IV/c	-	-	0	
	Gol. IV/b	2	-	2	
	Gol. IV/a	3	2	5	
	Jumlah Gol. IV	6	2	8	9,76 %
2	Gol. III/d	10	9	19	
	Gol. III/c	7	6	13	
	Gol. III/b	9	6	15	
	Gol. III/a	3	5	8	
	Jumlah Gol. III	29	26	55	67,07 %
3	Gol. II/d	1	4	5	
	Gol. II/c	3	1	4	
	Gol. II/b	7	-	7	
	Gol. II/a	1	-	1	
	Jumlah Gol. II	12	5	17	20,73 %
4	Gol. I/d	2	-	2	
	Gol. I/c	-	-	0	
	Gol. I/b	-	-	0	
	Gol. I/a	-	-	0	
	Jumlah Gol. I	2	0	2	2,43 %
	TOTAL (1+2+3+4)	49	33	82	100 %

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

Dari tampilan Tabel. 2.1. di atas terlihat bahwa komposisi PNS Pria lebih banyak (49 org = 59,75%) bila dibandingkan dengan PNS Wanita (33 org = 40,24%).

Tabel. 2.2. Komposisi PNS berdasarkan Agama
Keadaan 31 Desember 2020

NO	AGAMA	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Protestan	27	19	46	56,09 %
2.	Katholik	20	10	30	36,58 %
3.	Islam	1	2	3	3,65 %
4.	Hindu	1	2	3	3,65 %
5.	Budha	-	-	0	0
TOTAL		49	33	82	100

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

Tabel. 2.3. Komposisi PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan 31 Desember 2020

NO	TINGKAT ESELON	JUMLAH JABATAN	JABATAN TERISI			KET
			L	P	JLH	
1.	Eselon II/a	1	1	-	1	
2.	Eselon III/a	5	5	-	5	
3.	Eselon IV/a	15	7	8	15	
4.	Pejabat Fungsional	1	1	0	1	
TOTAL		22	14	8	22	

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

Tabel.2.4. Komposisi PNS pada Subdin/Bagian
Keadaan 31 Desember 2020

NO	SUBDIN/BAGIAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	Sekretariat	17	8	25	30,48 %
2.	Bidang Destinasi Pariwisata	14	4	18	21,95 %
3.	Bidang Pemasaran Pariwisata	8	7	15	18,29 %
4.	Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	8	13	15,85%
5.	Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5	6	11	13,41%
TOTAL		49	33	82	100 %

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

Tabel. 2.5. Komposisi PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan
Keadaan 31 Desember 2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH			KET
		L	P	JLH	
1.	S-3	-	-	0	-
2.	S-2	9	4	13	15,85 %
3.	S-1/D-IV	18	15	33	40,24 %
4.	Diploma/Sarjana Muda	9	4	13	15,85 %
5.	SLTA	14	5	19	23,17 %
6.	SLTP	3	-	3	3,66 %
7.	SD	1	-	1	1,21 %
TOTAL		49	33	82	100

Sumber: Dinas Parekraf NTT,2020

2.2.2. Aset SKPD

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain memiliki Sumber Daya Manusia, juga memiliki Sumber Daya berupa aset (Barang Bergerak dan Tak Bergerak) sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.6. Kondisi Aset Keadaan 31 Desember 2020

NO	ASET	JUMLAH	LOKASI	KONDISI
A	Barang Bergerak			
1.	Kendaraan Roda 4	2 unit	Kota Kupang	Baik
2.	Komputer (PC dan Laptop)	52 unit	Kota Kupang	Baik
3.	Printer	18 unit	Kota Kupang	Baik
4.	Infocus/LCD	3 unit	Kota Kupang	Baik
5.	GPS	4 unit	Kota Kupang	Baik
6.	Kamera	4 unit	Kota Kupang	Baik
7.	Drone	3 unit	Kota Kupang	Baik
8.	AC	14 unit	Kota Kupang	Baik
9.	Motor Sampah	1 unit	Kota Kupang	Rusak
10.	Kursi	20 unit	Kota Kupang	Baik
	Kursi Lipat (fernekel)	20 unit	Kota Kupang	Baik
11.	Meja	78 unit	Kota Kupang	Baik
12.	Lemari	25 unit	Kota Kupang	Baik
	Rak Arsip	2 unit	Kota Kupang	Baik
13.	Handycam	4 unit	Kota Kupang	Baik
14.	TV	3 unit	Kota Kupang	Baik
15.	Genset	1 unit	Kota Kupang	Baik
16.	Mesin Sidik Jari	1 unit	Kota Kupang	Baik
17.	Peralatan Rumah Tangga (kain gordena, tempat sampah, sapu, dll)	1 paket	Kota Kupang	Baik
B	Barang Tidak Bergerak			
1.	Tanah kantor	1 kapling – 10.000 m ²	Kota Kupang	Baik – ada SHM
2.	Tanah utk lokasi wisata	5 kapling	Kota Kupang, pantai Pede Labuan bajo dan Moni Kab. Ende	Baik – ada SHM
3.	Tanah utk perumahan dinas	6 kapling	Kota Kupang	Baik – ada SHM
4.	Gedung Kantor	3 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
5.	Gedung kantor	1 unit	Labuan Bajo	Baik
6.	Gudang kantor	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
7.	Rumah Dinas	1 unit	Kota Kupang (Kayu Putih)	Baik
8.	Rumah Dinas / Mess	6 unit	Kota Kupang (BTN Kolhua)	Baik
9.	Bangunan utk wisata (penginapan, lopo)	4 kawasan	Lasiana dan Gua Monyet Kota Kupang, Moni dan pantai Ria Kab. Ende.	Baik

Sumber: Dinas Parekraf NTT, 2020

Tabel. 2.7. Data Aset yang Berkontribusi pada PAD dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET 2020	TARGET SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
	Retribusi Jasa Usaha				
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	395,950,000	325.950.000	44.200.000	0.14
	a. Sewa Rumah Dinas (5 unit)	40.950.000	40.950.000	17.850.000	
	b. Sewa Stand Pameran (Booth)	350.000.000	280.000.000	-	
	c. Sewa Lapak di Pantai Lasiana	5.000.000	5.000.000	17.350.000	
2.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	951.162.000	675.000.000	116.309.000	0.17
	a. Kawasan Wisata Kampung Seni Flobamorata (Gua Monyet)	210.162.000	175.000.000	391.000	
	b. Kawasan pantai Lasiana	750.000.000	500.000.000	115.918.000	
3.	Pendapatan Lain-Lain			9.000.000	
	Rekapitulasi	1.347.112.000	1.000.950.000	160.509.000	0.16

Sumber: Dinas Parekrif NTT, 2020

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SAAT INI (CAPAIAN KINERJA)

Kinerja pelayanan PD yang dapat digambarkan adalah dilihat dari seberapa besar capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA (Induk) periode 2018 – 2023, yang digambarkan secara kualitatif. Penggambaran secara kualitatif ini tentunya belum dapat menunjukkan besaran perkembangan pembangunan kepariwisataan secara kuantitatif tetapi dapat memberi informasi bahwa pembangunan sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Adapun capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) *Tujuan : meningkatkan kualitas DTW, koordinasi, jaringan kerjasama informasi dan komunikasi antar sektor (pemerintah dan swasta), dicapai melalui sasaran :*
 - a. Tersedianya DTW yang siap pakai : indikator :
 - a.1. tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman pembangunan suatu kawasan antara lain : RIPPARDA;
 - b. Kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan

- b.1. terjalannya koordinasi antar sektor, antara lain dengan sektor perhubungan berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas, sektor perindag berkaitan dengan pembinaan industri pendukung kepariwisataan (tenun ikat), sektor koperasi berkaitan dengan pembinaan usaha kecil, sektor kimpraswil berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana menuju DTW;
- b.2. koordinasi kemitraan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi berbagai mitra kepariwisataan antara lain PHRI, HPI, GAHAWISRI, ASITA, FORMASI, Forum, maskapai penerbangan, media masa (cetak dan elektronik), dll;
- b.3. koordinasi antar wilayah ditunjukkan dengan dukungan dan partisipasi Kab/Kota dalam berbagai aktivitas pembangunan kepariwisataan, forum Rakor yang telah menghasilkan berbagai kesepakatan strategis.
- c. Kerjasama yang sinergis antar seniman, budayawan, swasta dan masyarakat untuk pemanfaatan seni budaya secara optimal :
 - c.1. Melibatkan pelaku seni (sanggar, perorangan) untuk turut serta dalam berbagai event baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c.2. Melaksanakan kegiatan pentas seni budaya lewat jambore pariwisata, dan Festival lainnya di Daerah;
- d. Meningkatnya *length of stay (LOS)*, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan
- e. Tersedianya Data Base Kepariwisata :
Data yang tersedia adalah data mentah berupa jumlah potensi kepariwisataan yang ada pada masing-masing kabupaten/kota termasuk jumlah kunjungan, yang diproduksi setiap tahunnya. Data ini mesti ditingkatkan lagi penyediaannya sebagai bahan analisis dan penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan ke depan.

2) *Tujuan : meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi Kreatif :*

- a. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan :
Hal ini dapat terlihat dari berbagai dukungan masyarakat baik dalam pelaksanaan event pertunjukan, maupun dalam dukungan

pembangunan fisik kepariwisataan. Di samping itu masyarakat juga turut mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang dari berbagai aktivitas kepariwisataan yang ada dengan menjalankan usaha kreatif;

- b. Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembudayaan Sapta Pesona sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang aman, tertib, bersih, sehat, indah, ramah tamah dan kenangan :

Sampai dengan saat ini terdapat 221 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai ujung tombak pelaksanaan Sapta Pesona terutama di lingkungan sekitar objek wisata. Dan untuk itu pada setiap tahun dilaksanakan lomba Pokdarwis sebagai ajang untuk bertukar pengalaman berkaitan dengan pembudayaan Sapta Pesona di lingkungan masing-masing;

3) *Tujuan : meningkatkan profesionalisme pelayanan usaha pariwisata :*

- a. Terwujudnya pelayanan usaha pariwisata yang profesional :
untuk menapai hal ini, maka telah dilaksanakan kegiatan antara lain : Temu Mitra Usaha Pariwisata (*Coffee Morning*), Pelatihan Pramuwisata, festival makanan Khas dan Sovenir Khas, ;
- b. Tersedianya standar dan prosedur pelayanan publik :
hal ini belum dilaksanakan secara maksimal berkaitan dengan masih *rancu* pembagian kewenangan pemerintahan antar wilayah. Diharapkan dengan berlakukanya PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota, akan lebih memperjelas urusan bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawab masing-masing tingkatan wilayah;
- c. Penataan kelembagaan yang sinergis dan pelayanan administrasi kelembagaan yang efektif dan efisien;
Hal ini ditunjukkan dengan penyelesaian berbagai administrasi kedinasan yang tidak mengalami kendala berarti dalam periode ini.

Hasil pencapaian kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu pelaksanaan RENSTRA tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian		Ratio Capaian	
					2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Tersedianya <i>Tourism Information Center (TIC)</i>				7 Unit	14 Unit	1 Unit	1 Unit	0.14	0.07
2	Tersedianya Literasi Destinasi Pariwisata Dalam Bentuk Digital				7 Obyek	14 Obyek	7 Obyek	7 Obyek	1.00	0.50
3	Tersedianya Jumlah Pariwisata <i>Estate</i>				7 Kawasan	14 Kawasan	7 Kawasan	9 Kawasan	1.00	0.64
4	Meningkatnya Jumlah Usaha di Bidang Pariwisata yang Dikelola Masyarakat				2006 Unit	2206 Unit	2114 Unit	2281 Unit	1.05	1.03
5	Meningkatnya Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat dengan Data Terpilih Gender				361 Orang	418 Orang	498 Orang	0 Orang	1.38	-
6	Meningkatnya Jumlah UMKM yang Berbasis Ekonomi Kreatif				50 Unit	55 Unit	187 Unit	98 Unit	3.74	1.78

Dari tabel 2.8. digambarkan bahwa pencapaian indikator kinerja dinas pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2019 dan 2020 masih dibawah target pencapaian yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tidak sesuai target, antara lain:

- a. Kegiatan promosi yang dilakukan belum optimal untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara, jumlah festival yang terbatas dan belum terkoneksi dengan baik sesuai jadwal kalender tetap yang sudah dipromosikan satu tahun sebelumnya;
- b. Sumber daya manusia dikelompok Sadar Wisata yang terbatas dalam mengelola destinasi wisata menjadi destinasi yang memenuhi kriteria 5A;
- c. Terbatasnya akses pemasaran destinasi dalam paket-paket wisata baik pasar wisatawan mancanegara maupun wisatawan asing;

- d. Jumlah tenaga profesi pariwisata dan usaha ekonomi kreatif bersertifikat yang terbatas dalam mendukung penyediaan industri pariwisata berkualitas;
- e. Kolaborasi antar pelaku bisnis pariwisata yang belum terintegrasi dengan baik dalam membentuk jalur wisata antar destinasi, antar pulau dan nasional.

Dukungan pencapaian indikator melalui program dan kegiatan dari tahun 2019 hingga 2020 digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	Uraian	Anggaran		Realisasi Anggaran		Ratio Antara Realisasi Anggaran dan Anggaran		Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	URUSAN PILIHAN (PARIWISATA)								
1	Pendapatan	400,000,000	1,000,950,000	563,092,000	160,509,000	1.41	0.16	0.60	-2.51
2	Belanja Tidak Langsung	7,750,285,000	7,867,158,000	7,254,203,761	7,305,228,573	0.94	0.93	0.01	0.01
3	Belanja Langsung	46,964,325,750	19,744,974,087	43,223,016,815	17,975,202,351	0.92	0.91	-1.38	-1.40
.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,452,259,500	1,765,040,337	1,321,580,771	1,685,073,067	0.91	0.95	0.18	0.22
.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283,500,000	347,995,000	282,589,114	338,854,034	1.00	0.97	0.19	0.17
.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20,000,000	26,250,000	16,500,000	26,246,000	0.83	1.00	0.24	0.37
.	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	45,208,566,250	7,879,390,000	41,602,346,930	7,403,357,840	0.92	0.94	-4.74	-4.62
.	Program NTT Bangkit	-	9,726,298,750	-	8,521,671,410	-	0.88	1.00	1.00

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun 2020 memperoleh anggaran APBD sebesar **Rp. 55.850.728.000**, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.077.382.000 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 47.773.346.000, dengan realisasi dapat dilihat dalam tabel 2.8 Dalam perjalanan terdapat perubahan dan revisi anggaran dan pendapatan karena beberapa hal seperti adanya Pandemi *Covid-19* yang juga mempengaruhi realisasi anggaran dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun 2020.

Tabel.2.10. Alokasi dan Realisasi Anggaran 2020

NO	Program	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	Persentasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.808.022.500	1.765.040.337	1.685.073.067	95,46%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	341.995.000	347.995.000	338.854.034	97,37%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26.250.000	26.250.000	26.246.000	99,98%
4.	Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.227.858.500	7.879.390.000	7.403.357.840	93,95%
5.	Program NTT Bangkit	22.369.220.000	9.726.298.750	8.521.671.410	87,61%
	Jumlah	47.773.346.000	19.744.974.087	17.975.202.351	91,03%

Pengurangan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 mempengaruhi angka ratio penganggaran menjadi negatif dengan perbandingan penganggaran tahun 2019. Pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada program NTT bangkit memiliki ratio pertumbuhan 1 (satu) diakibatkan pada tahun 2019 program tersebut tidak dialokasikan anggaran, secara substansi indikator dianggarkan pada program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga pemisahan kegiatan pada tahun 2020 menjadi program NTT bangkit menyebabkan angka ratio tahun 2020 menjadi -4,73.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengembangan dan pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditinjau dari aspek-aspek yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator pelayanan di perangkat daerah yang dianalisis tantangan dan peluang terhadap RENSTRA Kemenparekraf dan RTRW Provinsi NTT:

2.4.1. Peluang

- Sinkronisasi tujuan, sasaran dan target kementerian dapat meningkatkan pencapaian indikator RENSTRA Disparekraf dan RPJMD NTT;
- Pusat melakukan pembangunan sektor pariwisata melalui KSPN yang ada di wilayah NTT, antara lain KSPN Labuan Bajo, KSPN Kelimutu dan KSPN Rote Ndao dan sekitarnya;
- Pengembangan kawasan pariwisata sesuai pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW;
- Pengembananagan kawasan strategis pariwisata provinsi sebagai kawasan pengembangan pariwisata estate.

2.4.2. Tantangan

- Banyak lokasi destinasi wisata berada pada daerah hutan lindung, cagar alam dan daerah rawan bencana;
- Pembangunan infrastruktur pariwisata berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan kemampuan lahan dan daya dukung lahan;
- Menjaga kelestarian lingkungan akibat sampah dan eksploitasi lingkungan;
- Persandingan target indikator RENSTRA Kementerian dengan RENSTRA Disparekraf;
- Koordinasi intens dalam pembangunan destinasi, SDM dan usaha ekonomi kreatif antara kementerian dan pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu :

- a) Struktur organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan indikator program masih terkendala pada pembagian struktur eselon IV terutama pada bidang yang belum sinkron dengan tugas pokok dan fungsi;
- b) Jumlah ketersediaan pegawai sebagai tenaga pelaksana program dan kegiatan masih terkendala pada kapasitas bidang ilmu pariwisata, ekonomi dan teknik;
- c) Relatif masih rendahnya kualitas SDM sektor kepariwisataan. Secara umum HDI NTT ranking 31 Nasional (2017);
- d) Keterbatasan fungsional bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif, kearsipan dan asset;
- e) Fasilitas pendukung perkantoran yang masih minim dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, pelaksanaan event dan pembuatan video promosi dan pemasaran.

Permasalahan pembangunan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur :

- a) PANDEMI Covid-19 mengakibatkan penurunan aktifitas masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi masyarakat, baik dalam jumlah kunjungan wisatawan maupun perkembangan industri IKM dan UMKM ditunjukkan dari besar nilai kunjungan wisatawan tahun 2019 sebanyak 1.448.494 orang menurun sebanyak 149% pada tahun 2020 menjadi 650.170 orang;
- b) Belum adanya konsep penerapan *Community Base Tourism* (CBT) pada pengembangan industri pariwisata di kawasan strategis pengembangan pariwisata dilihat dari jumlah pengelolaan kawasan pariwisata oleh kelompok masyarakat disekitar daerah wisatawan masih terbatas;

- c) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya dimana jumlah Daya Tarik wisata sebanyak 1.305 yang bisa diakses oleh wisatawan;
- d) Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial pariwisata belum sadar wisata ditunjukkan dengan kondisi pelayanan dan pengelolaan asset wisata serta lingkungan yang belum ramah wisatawan dan lingkungan;
- e) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan dengan minimnya dokumen penjabaran dari RIPPARDA, RKPP, Master Plan dan Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Pariwisata;
- f) Belum optimalnya kerjasama lintas sector pariwisata (lembaga);
- g) Belum adanya desain untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- h) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif;
- i) Keterbatasan SDM profesional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat mengisi kebutuhan pengembangan pariwisata serta menjadi perintis usaha ekonomi kreatif baru, serta kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam menguasai informasi dan teknologi;
- j) Fasilitas yang lemah dari pemerintah kepada pelaku bisnis pariwisata dan usaha IKM dan UMKM bidang ekonomi kreatif baik dalam standarisasi usaha maupun pengembangan usaha pada pasar nasional dan internasional;
- k) Kurangnya pagelaran atraksi seni budaya daerah sebagai bentuk apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan produk seni budaya agar bernilai ekonomis;
- l) Rendahnya aksesibilitas :
 - Terbatasnya moda transportasi;
 - Ketidakpastian jadwal penerbangan;
 - Tarif transportasi udara yang tinggi.
- m) Terbatasnya infrastruktur, antara lain : jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dll.
- n) Terbatasnya sarana/prasarana pendukung objek : Hotel/ Restoran, BPW, Guide, Sarana hiburan, dll
- o) Terbatasnya jangkauan promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah, terutama ke pasar wisata potensial.
- p) Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang digambarkan dengan jumlah tenaga tersertifikasi

pofesi pariwisata dan pengakuan hak cipta usaha dan produk ekonomi kreatif yang masih terbatas;

- q) Belum optimal dalam pengelolaan aset destinasi wisata kewenangan provinsi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

3.2.1. VISI

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang di atas, tergambar berbagai problematik bidang pariwisata dan ekonomi kreatif daerah sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk membangun aspek ini sebagai jati diri bangsa serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu RPJMD Provinsi NTT periode 2018 – 2023, telah menetapkan Visi Pemerintah Provinsi NTT yaitu : **“NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**, dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Dalam semangat inilah maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam gerak pembangunan secara teknis berkontribusi mewujudkan masyarakat sejahtera dengan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah roh penggerak, yang berusaha menggambarkan tentang arah pola gerak pembangunan Nusa Tenggara Timur, dengan pola gerak yang ekstrim yakni Bangkit. Visi **NTT Bangkit**, mau mengandaikan bahwa apapun kondisi NTT saat ini, pada kuadran manapun NTT saat ini, harus menjadi titik nol atau titik berangkat, yang melecut sekaligus melontarkan kita pada keadaan Bangkit, Bangun, Berdiri dari sebuah posisi yang mati, tak berdaya, miskin faedah, dan kondisi keterbatasan lainnya.

Sejahtera mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan

dan perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur.

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

3.2.2. MISI

Misi pembangunan Pariwisata Nusa Tenggara Timur, dalam Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, berada pada Misi-2 Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yakni **Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**. Sejalan dengan tekad Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 yang menjadikan Pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan NTT, Pariwisata diandaikan sebagai lokomotif yang diyakini memiliki daya ungkit sekaligus daya tarik yang mampu menarik gerbong pembangunan ekonomi masyarakat menuju sejahtera, maka dalam konteks Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, semua sektor harus secara bersama-sama mendukung pembangunan pariwisata. Konsep pembangunan dari sektor terkait, harus dirancang memenuhi cita rasa pariwisata, dan memenuhi kebutuhan pariwisata.

Adapun nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan misi ini adalah spirit dan dorongan yang melandasi berbagai upaya pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain:

a. *Komitmen dan Konsistensi:*

Komitmen adalah keteguhan hati, tekad yang mantap dan janji untuk melakukan atau mewujudkan sesuatu yang telah diyakini untuk dilaksanakan, sedangkan *konsistensi* adalah ketetapan, kesesuaian, ketaatan dan kemantapan dalam bertindak terhadap komitmen (taat azas);

b. *Keiklasan dan Kejujuran:*

Keiklasan adalah kerelaan yang sepenuh hati, datang dari lubuk hati serta tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas sesuatu perbuatan khususnya yang berdampak positif bagi orang lain sedangkan *kejujuran* adalah sikap yang berpihak pada kebenaran dan sikap moral yang teruji (*morally up right*) sehingga berani menolak dan

bertindak melawan segala kebutuhan yang bertentangan dengan suatu kewajiban;

c. *Kebersamaan dan Dinamika Kelompok :*

Kebersamaan adalah suatu sikap dan perilaku yang menggambarkan suasana hati bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok kerja tertentu sehingga tumbuh perasaan bersama yang kuat dalam suatu kelompok dan melahirkan kelompok kerja yang sinergis dalam melaksanakan tugas secara bersama, sedangkan *Dinamika Kelompok* adalah cara kerja kelompok bersifat dinamis, kreatif dan sinergis dalam melayani dan/atau mencapai sasaran kerja secara menyeluruh;

d. *Disiplin dan Keteraturan Kerja:*

Disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri, tenang dan tetap taat pada aturan, norma dan prinsip tertentu walaupun pada saat yang sangat menekan sekalipun, sedangkan *Keteraturan Kerja* adalah sikap dan tindakan yang mengikuti jadwal dan sistem kerja yang telah tersusun dan terencana secara baik serta bersifat sistematis, dinamis dan berorientasi pada hasil ‘*start slowly and build up slowly on regular basis*’.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta penjabaran urusan melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kerangka Kerja Logis Renstra Kementerian Pariwisata Periode Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi : Memperkokoh struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui optimasi pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif			
1 Meningkatkan kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional	- Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional, - Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan, - “Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional”, “Tersedianya produk pariwisata sesuai	Kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional melalui : 1. Kajian Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Regulasi yang mendukung pembangunan	1 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). 2 Capaian sasaran strategis ini diukur melalui 10 IKSS. 3 5 (lima) IKSS. 4 1 (satu) IKSS
2 Tujuan akhir Kemenparekraf/Baparekraf adalah meningkatnya			

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam mewujudkan Visi Presiden tahun 2024	kebutuhan” Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan serta meningkatnya kemampuan industri sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional”, dan terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif”. - Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian”, “Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif”, dan “Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif”. - Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional	Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Nasional 3. Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Secara Tepat Guna 4. Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/B aparekraf	

Dalam mensinergikan indikator sasaran pembangunan pariwisata antara kementerian dan dinas pariwisata dan ekonomi kreatif digambarkan tabel persandingan indikator sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Indikator Kinerja dan Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata
(Periode 2020-2024) dan
Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT (2021-2023)

No.	Indikator Kinerja Kementerian Parekraf	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Sasaran pada Renstra Kementerian Parekraf
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Pemenuhan 5A pada kawasan strategis Provinsi	1 Nilai devisa pariwisata 2 Kontribusi PDB pariwisata 3 Nilai ekspor produk ekonomi kreatif
2.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Terciptanya diversifikasi destinasi Pariwisata	Nilai tambah ekonomi kreatif
3.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan		1 Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) 2 Jumlah <i>spending</i> wisman

No.	Indikator Kinerja Kementerian Parekraf	Sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Sasaran pada Renstra Kementerian Parekraf
			3 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 4 Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)</i>
4.	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Meningkatnya daya saing Pariwisata	Jumlah Produk Pariwisata Nasional
5	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan		Jumlah Produk Pariwisata Nasional
6	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional		1 Rasio usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi dan tersertifikasi 2 Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif 3 Rasio usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapat akses pembiayaan terhadap total usaha pariwisata dan ekonomi kreatif
7	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif		Jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya
8	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian		Indeks regulasi berbasis kajian terkait pariwisata dan ekonomi kreatif
9	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif		Jumlah hasil kajian parekraf yang dimanfaatkan/diproduksi
10	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif		1 Jumlah Tenaga kerja Pariwisata 2 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif 3 Jumlah lulusan sekolah vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menuju birokrasi yang profesional		Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan tabel 3.2. tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa agenda strategis jangka menengah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 1) Meningkatnya citra kepariwisataan, 2) Terciptanya diversifikasi destinasi Pariwisata, 3) Meningkatnya daya saing pariwisata, yang akan diterjemahkan sesuai dengan kewenangan dan sub urusan kepariwisataan yakni Destinasi, Pemasaran, Industri, dan Kelembagaan Pariwisata.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Potensi daya Tarik wisata (DWT) berdasarkan tema wisata seperti alam, budaya, buatan dan minat khusus menunjukkan sebaran pada 22 kabupaten/kota dengan total DWT sebanyak 1.305 destinasi dengan rincian alam sebanyak 643 (49%) budaya sebanyak 536 (41%) dan minat khusus sebanyak 126 (10%).

Pemanfaatan pengelolaan pariwisata disesuaikan dengan pola ruang kawasan yaitu dalam kawasan lindung dan kawasan budaya dengan mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung kawasan, daerah rawan bencana dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam pola ruan disebutkan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, dimana salah satu kawasan adalah Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut. Kawasan jenis ini ditetapkan dengan kriteria :

1. Memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan langka;
2. Memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
3. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam; dan
4. Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

Adapun kawasan-kawasan yang termasuk pada kriteria tersebut yang terdapat di propinsi NTT, adalah meliputi:

1. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage di Kabupaten Alor;
2. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng I di Kabupaten Ende;
3. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng II di Kabupaten Ende;
4. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar di Kabupaten Sikka;
5. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Menipo di Kabupaten Kupang;
6. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai;
7. Kawasan Taman Wisata Alam Egon Illimedo di Kabupaten Sikka;
8. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao;
9. Kawasan Taman Wisata Alam Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;

10. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada;
11. Kawasan Taman Wisata Alam Camplong di Kabupaten Kupang;
12. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor; dan
13. Kawasan Taman Wisata Baumata di Kabupaten Kupang.

a. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria sebagai hasil budidaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan ini meliputi sebagai berikut :

1. Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
2. Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang;
3. Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang;
4. Kawasan Gua Alam Baumata di Kabupaten Kupang; dan
5. Kawasan cagar budaya berupa kampung adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu;
6. Kawasan Gua Bitauni di TTU.

Adapun luasan kawasan ini dimasing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Luasan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, Cagar Budaya Provinsi NTT Tahun 2010-2030

KABUPATEN/ KOTA	LUASAN (HA)				
	CAGAR ALAM	SUAKA MARGASATWA	TAMAN NASIONAL	TAMAN WISATA ALAM	PANTAI HUTAN BAKAU
Sumba Barat	-	-	2,248.48	-	71.63
Sumba Timur	10,887.43	-	46,378.51	-	722.72
Kupang	-	1,253.11	-	7,927.12	660.24
Timor Tengah Selatan	8,892.48	5,827.13	-	2.74	668.26
Timor Tengah Utara	3,149.82	-	-	-	128.94
Belu	7,418.97	4,695.18	-	-	1,368.36
Alor	-	-	-	5,436.16	504.54
Lembata	-	-	-	-	855.92
Flores Timur	-	-	-	-	612.75
Sikka	-	-	-	7,295.58	242.52
Ende	898.01	-	5,310.69	889.33	442.78
Ngada	9,565.46	-	-	360.76	69.44
Manggarai	-	-	-	10,003.24	85.16
Rote Ndao	-	546.40	-	-	1,426.99

KABUPATEN/ KOTA	LUASAN (HA)				
	CAGAR ALAM	SUAKA MARGASATWA	TAMAN NASIONAL	TAMAN WISATA ALAM	PANTAI HUTAN BAKAU
Manggarai Barat	1,164.38	-	50,546.29	-	1,307.84
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	49.16
Sumba Tengah	5,276.22	-	46,998.60	-	161.30
Nagekeo	-	-	-	-	511.73
Manggarai Timur	-	-	-	23,391.77	167.76
Kota Kupang	-	-	-	230.27	14.73
Sabu Raijua	-	-	-	-	-
Total	47,252.75	12,321.82	151,482.58	55,536.94	10,072.76

Sumber: Pengolahan Data, 2010

3.5. TELAAHAN DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS (DPP) LABUAN BAJO

Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-20 tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) *Digital tourism (etourism)*; 2) *Homestay*; 3) *Air accessibility*; 4) *Branding*; 5) *Top 10 origination*; 6) *Top 3 main destination (15 destination branding)*; 7) *Develop 10 new priority tourism destinations*; 8) *Certified human resources in tourism & tourism awareness movement*; 9) *Tourism investment growth*; dan 10) *Crisis center management* (Kemenpar, 2019).

Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-21 penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun

mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas.

Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpan (*feeder*) di Pelabuhan Tenau Kupang; dukungan infrastruktur transportasi, RPJMD Perubahan Provinsi NTT 2018-2023 NTT Bangkit, NTT Sejahtera IV-22 energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai Destinasi Wisata Premium yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai Destinasi Pariwisata Super Premium. Tujuan akhir “wisata super premium” di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bernilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai “destinasi pariwisata super premium”, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan “wisatawan super premium”. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa.

Strategi pengembangan “pariwisata super premium” secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (*sustainable luxury* Labuan Bajo Flores) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar sustainability. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor daratan maupun laut (bahari).

3.6. TELAAHAN BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES (BPOLBF)

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), sesuai dengan landasan yuridis pembentukannya, yaitu Perpres No. 32 Tahun 2018 dan secara struktur dibentuk pada tahun 2019, mengemban peran sebagai akselerator pembangunan pariwisata melalui fungsi koordinatif dan otoritatif di kawasan Labuan Bajo dan 10 Kabupaten lainnya di daratan Flores. Koordinasi lintas kementerian, lintas kabupaten dan lintas kelembagaan menjadi komitmen BPOLBF selama ini, sehingga sinergitas berada pada frekuensi yang sama guna memastikan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dan Flores terlaksana seiring dengan ditetapkannya Labuan Bajo Flores sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau disingkat dengan BPOLBF merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. BPOLBF memiliki 11 wilayah kordinatif meliputi Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Tengah, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Bima.

Program Utama BPOLBF:

1. Penyusunan produk wisata berkualitas;
2. Pengembangan kawasan pariwisata terpadu;
3. Peningkatan daya saing destinasi;
4. Peningkatan jumlah akomodasi dan restoran;
5. Penerapan protokol CHSE destinasi.

Tugas BPOLBF sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi, sinkronasi dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
2. Melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Fungsi BPOLBF sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana;
2. Penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronasi dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
4. Penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
5. Perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
6. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
7. Penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
8. Pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

Kewenangan BPOLBF sebagai berikut:

1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
2. Menggunakan tanah untuk keperluan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kepariwisataan;

3. Menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau keuntungan hasil usaha kerja sama.

3.7. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu dari beberapa sudut pandang yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Kementerian, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain:

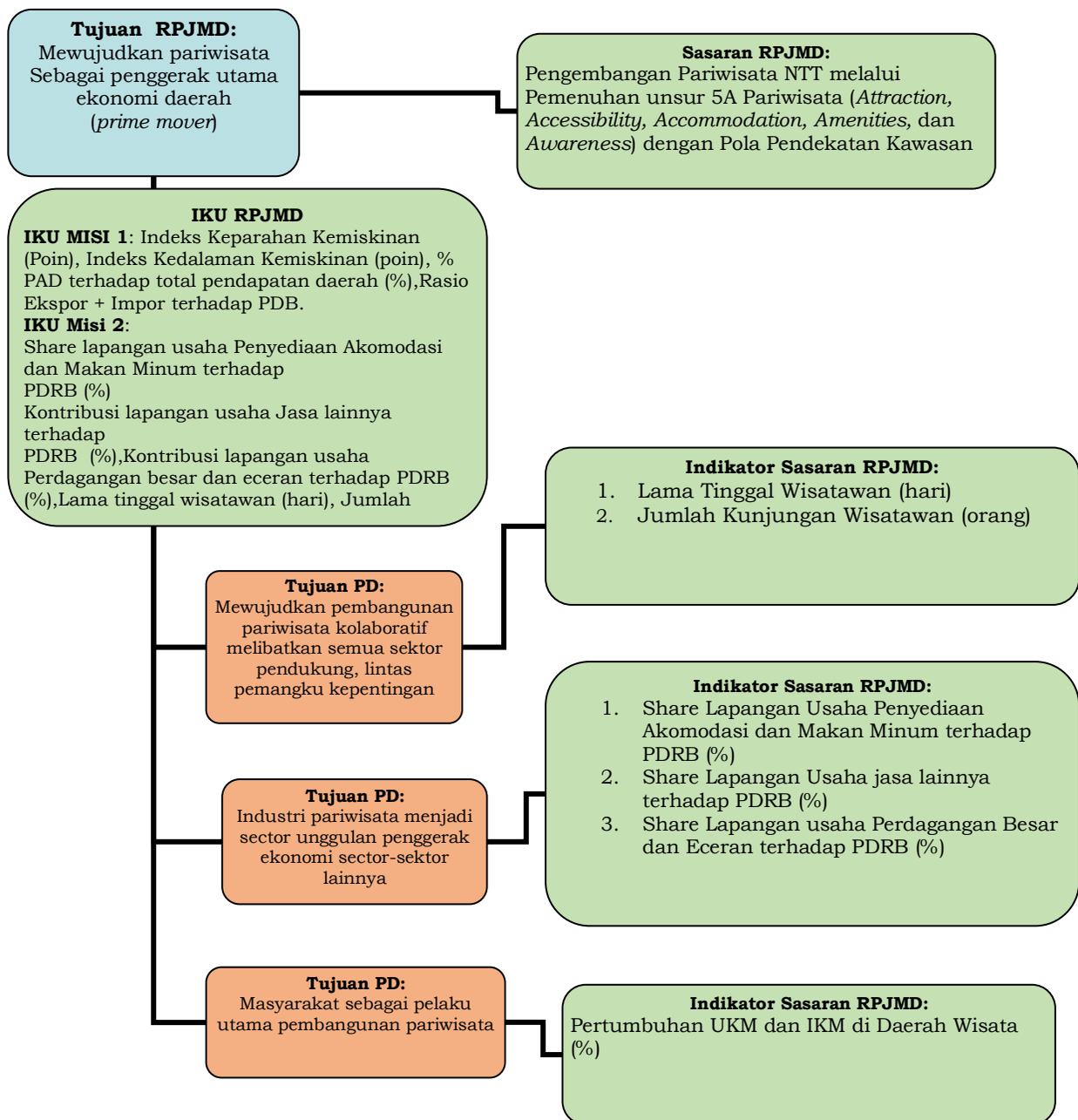
- a. Penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan program dan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019;
- b. Penyediaan fasilitas pendukung operasional perkantoran dalam mendukung aktifitas pelaksanaan perkantoran, pelayanan informasi publik dan promosi;
- c. Penguatan sarana-prasarana dasar pada lokasi aset pariwisata provinsi yaitu pantai Lasiana, Kampung Seni Flobamorata (eks gua monyet) dan Koanara/Kelimutu;
- d. Penerapan destinasi tanggap bencana pandemi *covid-19* dengan penerapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE, penyediaan wadah promosi dan pemasaran UMKM berbasis digital/virtual;
- e. Penguatan POKDARWIS dan kelompok kerja dalam tata kelola secara bersama-sama dalam organisasi terlegitimasi hukum dan ramah terhadap lingkungan dan kelestaian alam sekitar;
- f. Penyediaan regulasi hukum dan dokumen turunan RIPARDA berupa Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, Master Plan Pengembangan Destinasi, dan Rencana teknis pengembangan berupa *Detail Engineering Design* (DED);
- g. Peningkatan kerjasama lintas sector pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam bentuk forum diskusi regular dan wadah regulasi peraturan daerah;
- h. Penyediaan wadah kreasi pelaku IKM dan UKM disektor ekonomi kreatif dan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual produk dan usaha;
- i. Peningkatan promosi pariwisata obyek wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

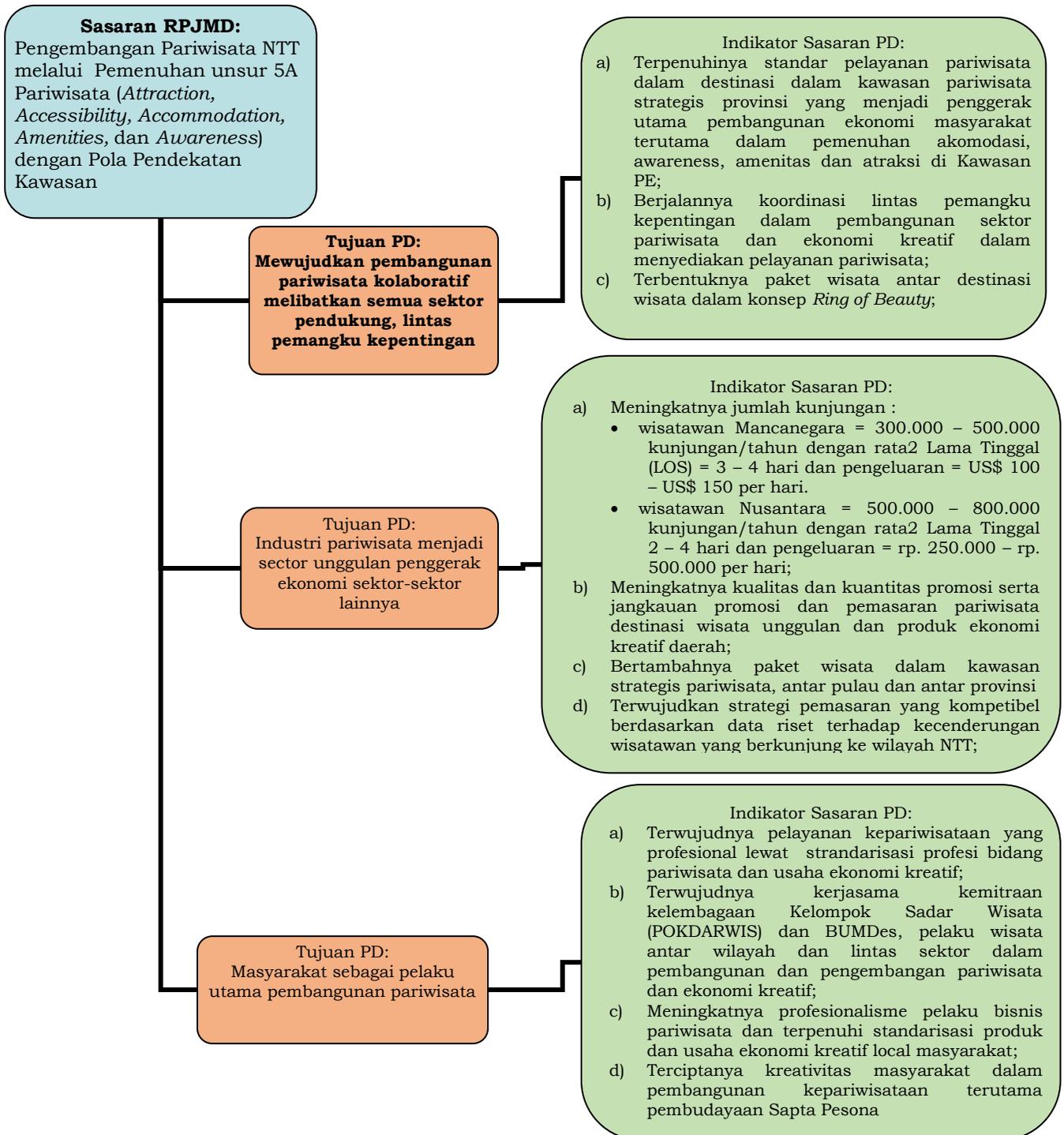
4.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Tujuan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 pada misi ke-2 adalah Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*). Tujuan tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut:

Gambar 4.1. Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan PD



Gambar 4.2. Cascading sasaran RPJMD dan Sasaran PD



Sasaran dalam RPJMD: Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan Pola Pendekatan Kawasan. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka penentuan sasaran merupakan indikator pencapaian tujuan dimaksud dengan memperhatikan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Result oriented, Time bond*), antara lain :

1. Tujuan mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan maka dicapai melalui sasaran:
 - a) Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, amenities dan atraksi di Kawasan Pariwisata Strategis (PE);
 - b) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;
 - c) Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep *Ring of Beauty*;
 - d) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat;
 - e) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata.

2. Tujuan Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya, dapat dicapai melalui sasaran :
 - a) Meningkatnya jumlah kunjungan :
 - wisatawan Mancanegara = 300.000 – 500.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal (LOS) = 3 – 4 hari dan pengeluaran = rp. US\$ 100 – US\$ 150 per hari;
 - wisatawan Nusantara = 500.000 – 800.000 kunjungan/tahun dengan rata2 Lama Tinggal 2 – 4 hari dan pengeluaran = rp. 250.000 – rp. 500.000 per hari;
 - b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;
 - c) Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi
 - d) Terwujudkan strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT.

3. Tujuan Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata dapat dicapai melalui sasaran :
 - a) Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan usaha ekonomi kreatif;
 - b) Terwujudnya kerjasama kemitraan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan BUMDes, pelaku wisata antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;
 - d) Terciptanya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan terutama pembudayaan Sapta Pesona.

4.2. INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN

Penjabaran Tujuan dan sasaran dan sasaran perangkat daerah dalam rencana strategis dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			KONDISI PADA AKHIR PERENCANAAN
				2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan	a) Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, ammenitas dan atraksi di Kawasan PE;	Pemenuhan 5A pada 24 kawasan pariwisata estate	9 PE	9 PE	9 PE	6 PE	24 PE
		b) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	Forum Koordinasi	2 Forum	5 Forum	10 Forum	10 Forum	27 Forum
		c) Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep <i>Ring of Beauty</i> ;	Jumlah Paket wisata meliputi kawasan PE	0 Paket	1 Paket	10 Paket	10 Paket	21 Paket
		d) Meningkatnya profesionalisme pelaku	Sertifikasi profesi bidang jasa pariwisata	0 Sertifikat	300 Sertifikat	300 Sertifikat	300 Sertifikat	900 Sertifikat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			KONDISI PADA AKHIR PERENCANAAN
				2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	dan ekonomi kreatif Produk					
2	Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya	Meningkat Kunjungan wisatawan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisman pertahun	281.885	20.000	50.000	100.000	451.885
		Meningkat Kunjungan wisatawan Nusantara	Jumlah Kunjungan Wisnus pertahun	1.166.609	100.000	600.000	800.000	2.666.609
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;	Jumlah Tourism Information Center	1 Unit	4 Unit	14 Unit	5 Unit	24 Unit

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			KONDISI PADA AKHIR PERENCANAAN
				2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan festival dan pameran promosi	2 kegiatan	7 kegiatan	10 kegiatan	20 kegiatan	39 Kegiatan
		Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi	Paket wisata meliputi kawasan Pariwisata Estate	0 Paket	7 Paket	14 Paket	24 Paket	24 Paket
		Terwujudkan strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT	Jumlah kajian, analisa dan riset strategi pemasaran pariwisata	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	4 Kajian
3	Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;	terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tenaga bersertifikat profesi pariwisata dan ekraf	0 Orang	120 Orang	200 Orang	200 Orang	520 Orang
		terwujudnya kerjasama antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan	Jumlah kerjasama pelaku pariwisata dan ekraf yang difasilitasi	3 Kerjasama	10 Kerjasama	10 Kerjasama	10 Kerjasama	33 Kerjasama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN			KONDISI PADA AKHIR PERENCANAAN
				2019	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dan ekonomi kreatif						
		Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat; Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	Sertifikasi profesi bidang jasa pariwisata dan ekonomi kreatif Produk	0 Sertifikat	300 Sertifikat	300 Sertifikat	300 Sertifikat	900 sertifikat
			Jumlah pelaku usaha Industri Ekonomi Kreatif yang difasilitasi pelatihan lanjutan	0 Jenis Usaha	4 Jenis Usaha	10 Jenis Usaha	16 Jenis Usaha	30 Jenis Usaha
			Jumlah SDM profesi pariwisata yang difasilitasi pelatihan lanjutan	0 Pelatihan	10 Pelatihan	10 Pelatihan	10 Pelatihan	30 Jenis Usaha
			Jumlah Produk Ekonomi kreatif daerah yang disertifikasi HKI	0 Produk	2 Produk	2 Produk	2 Produk	6 Produk

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi yang adalah inti dari proses perencanaan strategis merupakan cara untuk merealisasikan rumusan tujuan secara nyata, yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan aktor pembangunan lainnya seperti kalangan swasta dan masyarakat. Strategi juga mencerminkan bagaimana SKPD memanfaatkan kekuatannya atau memperkecil kelemahannya dalam menangkap peluang dan/atau menghindari ancaman dalam pelayanan publik yang dilaksanakan.

Pada bab III sudah diuraikan mengenai masalah dan isu strategis dalam menjawab isu strategis pada urusan kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pada bab IV dijelaskan mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai, dari analisa yang sudah disampaikan tersebut dirumuskan strategi yang akan dilakukan oleh dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam target dan waktu pencapaian pada akhir masa berlaku RPJMD dan RENSTRA PD.

Strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menggunakan analisa SWOT. Proses analisis SWOT dimulai dengan menjabarkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dari lingkungan internal dan eksternal, kemudian membuat strategi tertentu. Proses analisis secara lengkap disajikan dalam bagian berikut sebagai berikut:

a. Lingkungan Strategis Internal

1. Kekuatan (*Strength*)

- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (Desa Wisata), dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pemasaran dan promosi;
- Adanya dukungan kebijakan serta fasilitasi peningkatan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata;

- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peran media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata;
- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan usaha wisata;
- Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi dan Akademisi;
- Letak geografis NTT yang menguntungkan sebagai gerbang selatan dan pasifik;
- Keberagaman potensi wisata NTT yang dapat menciptakan diversifikasi produk wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif;
- Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMN/BUMD, swasta (pelaku usaha) dan dunia pendidikan;
- Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata;
- Belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata;
- Belum optimalnya penerapan teknologi informasi pariwisata yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi pariwisata;
- Pemetaan destinasi belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan wisata;
- Terjadinya dampak kegiatan kepariwisataan berupa sampah yang ditimbulkan dengan upaya penyelesaiannya.

b. Lingkungan Strategis Eksternal

Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.

1. Peluang (*Opportunity*)

- Meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik,

pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata;

- Dinamisnya kemajuan dunia informasi dan teknologi menuntut sektor pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkannya sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas;
- Meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan;
- Meningkatnya serapan tenaga kerja/sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik lokal, regional, nasional dan internasional;
- Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan sapta pesona;
- Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat.

2. Ancaman (*Threat*)

- Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata;
- Globalisasi yang semakin bebas, memungkinkan menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal;
- Pesatnya perkembangan industri pariwisata di Provinsi dan negara lain;
- Letak geografis NTT pada jalur *ring of fire* yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api;
- Situasi politik internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan.

c. Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Faktor – faktor internal dan eksternal kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis *internal factor environment* (IFE) dan *external factor environment* (EFE).

Tabel 5.1. Analisis IFE

Kekuatan (Strength)				
No	Uraian	Bobot (weight)	Rating	Skor
1.	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (Desa Wisata), dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pemasaran dan promosi.	0,084	3.441	0,291
2.	Adanya dukungan kebijakan serta fasilitasi peningkatan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata,	0,059	3,382	0,201
3.	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peran media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata,	0,080	3,647	0,294
4.	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan usaha wisata.	0,067	3.205	0,215
5.	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi dan Akademisi.	0,078	3,441	0,271
6.	Letak geografis NTT yang menguntungkan sebagai gerbang selatan dan Pasifik	0.075	3.700	0.277
7.	Keberagaman potensi wisata NTT yang dapat menciptakan diversifikasi produk wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan	0.011	4.250	0.049
	Jumlah			1,602
Kelemahan (Weakness)				
No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif.	0,077	1.752	0,136
2.	Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMN/BUMD, swasta (pelaku usaha) dan dunia pendidikan.	0,073	1.994	0.145
3.	Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata	0,084	2.058	0,174
4.	Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata	0,079	2.005	0,160
5.	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi pariwisata yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi pariwisata	0,071	1,829	0,130
6.	Pemetaan destinasi belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan wisata.	0,074	1,723	0,127
7.	Terjadinya dampak kegiatan kepariwisataan berupa sampah yang ditimbulkan dengan upaya penyelesaiannya.	0,080	1,963	0,158
	Jumlah	1		1,033
	Jumlah IFE			2,636

Tabel 5.2. Analisis EFE

Peluang (Opportunity)

No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata,	0,120	3,682	0,445
2.	Dinamisnya kemajuan dunia informasi dan teknologi menuntut sektor pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkannya sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas,	0,126	3,652	0,461
3.	Meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan,	0,112	3,482	0,392
4.	Meningkatnya serapan tenaga kerja/sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik lokal, regional, nasional dan internasional,	0,109	3,335	0,366
5.	Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan sapta pesona,	0,112	3,423	0,385
6.	Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat.	0,010	4,500	0,049
	Jumlah			2,101

Ancaman (Threat)

No	Uraian	Weight	Rating	Skor
1.	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata.	0,094	1,817	0,172
2.	Globalisasi yang semakin bebas, memungkinkan menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal	0,121	2,017	0,245
3.	Pesatnya perkembangan industri pariwisata di Provinsi dan negara lain	0,118	1,970	0,232
4.	Letak geografis NTT pada jalur <i>ring of fire</i> yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api.	0,1078	1,812	0,104
5.	Situasi politik internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan.	0,013	1,350	0,018
	Jumlah			0,774
	Jumlah EFE			2,875

Tabel 5.3. Matriks IE

		Total IFE		
		4.00 - 3.00	2.99 - 2.00	1.99 - 1.00
Total EFE	4.00	I	II	III
		strategi tumbuh dan bina	strategi tumbuh dan bina	pertahankan dan pelihara
	3.00	IV	V	VI
		strategi tumbuh dan bina	pertahankan dan pelihara	strategi panen dan divestasi
	2.00	VII	VIII	IX
		pertahankan dan pelihara	strategi panen dan divestasi	strategi panen dan divestasi

Secara internal dengan nilai IFE sebesar 2,636 mengindikasikan kondisi Dinas Parekraf Provinsi NTT cukup kuat, namun perlu terus dilakukan upaya penguatan pada koordinasi lintas sektor, peningkatan kerjasama dan kemitraan serta penguatan kapasitas SDM Pariwisata. Sementara secara eksternal, nilai EFE adalah 2,875 yang mengindikasikan tantangan dari luar sangat kuat sehingga, Dinas Parekraf Provinsi NTT harus memperhatikan promosi pemasaran pariwisata yang semakin meningkat baik secara kuantitas dan kualitas mengingat arus globalisasi dan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata di luar NTT (nasional dan dunia). Hal ini juga menuntut perbaikan kualitas pelayanan pariwisata khususnya di era New Normal agar memiliki daya saing yang kuat.

d. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal, maka dapat dirumuskan berbagai strategi-strategi yang akan dilakukan dengan tabel analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 5.4. Analisis SWOT

		Kekuatan		Kelemahan
Faktor Internal	1	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan wisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (Desa Wisata), dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pemasaran dan promosi.	1	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif.
	2	Adanya dukungan kebijakan serta fasilitasi peningkatan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan	2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMN/BUMD, swasta (pelaku usaha) dan dunia pendidikan.
	3	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peran media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata,	3	Belum optimalnya kapasitas SDM pelaku usaha pariwisata
	4	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan usaha wisata.	4	Belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata
	5	Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi dan Akademisi.	5	Belum optimalnya penerapan teknologi informasi pariwisata yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi pariwisata
	6.	Letak geografis NTT yang menguntungkan sebagai gerbang selatan dan Pasifik	6	Pemetaan destinasi belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan wisata.
	7.	Keberagaman potensi wisata NTT yang dapat menciptakan diversifikasi produk wisata dan meningkatkan kunjungan wisatawan	7	Terjadinya dampak kegiatan kepariwisataan berupa sampah yang ditimbulkan dengan upaya penyelesaiannya.
Faktor Eksternal				
No	Peluang		Strategi SO	Strategi WO
1.	Meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata,		1. Memanfaatkan berbagai dukungan kebijakan dan fasilitasi untuk peningkatan kunjungan wisatawan (S1, S2, S3,S4,S5, O1) 2. Memanfaatkan teknologi informasi terbaru untuk pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka penetrasi pasar industri pariwisata (S3,S6,O2,O6)	1. Mendorong tumbuhnya berbagai atraksi dan akomodasi berbasis masyarakat (W1,W2,W4,W6,O3,O4, O5,O6) 2. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana promosi konvensional maupun media <i>on-line</i> (W2, W5,W6,O1, O2,O6)
2.	Dinamisnya kemajuan dunia informasi dan			

	teknologi menuntut sektor pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan dapat memanfaatkannya sehingga akan semakin sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas,			
3.	Meningkatnya permintaan yang tinggi terhadap fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan,		<p>3. Penyediaan fasilitas dasar dalam kawasan destinasi wisata strategis dan penambahan atraksi penunjang untuk meningkatkan daya tarik wisata (S2,S4,S7,O3,O5, O6)</p> <p>4. Pengembangan kapasitas pengelolaan destinasi dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif (S1,S5,S7,O4)</p>	<p>3. Menyusun peta perencanaan pengembangan pariwisata yang dapat menjadi panduan kerja kolaborasi antar sektor (W1,W6,O3,O5)</p> <p>4. Peningkatan Profesional Pelayanan Kepariwisataan melalui sertifikasi kompetensi (W2,W3,O1,O3,O4,O6)</p> <p>5. Penguatan kapasitas pengelolaan destinasi wisata (W4,W6,O6)</p>
4.	Meningkatnya serapan tenaga kerja/sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik lokal, regional, nasional dan internasional,			
5.	Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan saptapesona,			
6.	Ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat.			

No	Ancaman	Strategi ST	Strategi WT
1.	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan ekonomi kreatif dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata,	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor, kemitraan dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan melalui kerjasama antara pelaku bisnis wisata dan pengelola wisata dalam daerah dan luar daerah (S4,S5,T1,T2,T4,T5)	1. Penataan dan pengembangan industri ekonomi kreatif masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata pada kawasan strategis pariwisata provinsi/kawasan Pariwisata Estate (T1,T3, W2,W4,W6)
2.	Globalisasi yang semakin bebas, memungkinkan menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal	2. Diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing industri pariwisata dan ekraf (S4,S6,S7,T1,T2,T5)	2. Penyusunan segmentasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (T2,T3,W4,W6)
3.	Pesatnya perkembangan industri pariwisata di Provinsi dan negara lain	3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pemasaran pariwisata terutama ke pasar potensial dalam bentuk paket wisata sesuai jenis wisata yang tanggap terhadap bencana (S2,S3,S4,T1,T2,T3,T4)	3. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam menerapkan konsep sadar wisata. (T2,T4,T5,W3,W4,W7)
4.	Letak geografis NTT pada jalur <i>ring of fire</i> yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung api.		
5.	Situasi politik internasional yang berdampak pada kunjungan wisatawan		

Sumber ; hasil analisis,2021

Dari hasil analisis tabel SWOT maka strategi yang perlu dilakukan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selama 3 tahun ke depan adalah:

- a. Peningkatan koordinasi lintas sektor, kemitraan dan lintas wilayah dalam pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui kerjasama antara pelaku bisnis wisata dan pengelola wisata dalam daerah dan luar daerah;
- b. Menyusun peta perencanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang dapat menjadi panduan kerja kolaborasi antar sektor;
- c. Penyediaan fasilitas dasar dalam kawasan destinasi wisata strategis dan potensial dan penambahan atraksi penunjang untuk meningkatkan daya tarik wisata;
- d. Penataan dan pengembangan industri ekonomi kreatif masyarakat lokal sebagai daya tarik wisata pada kawasan strategis pariwisata provinsi/kawasan Pariwisata Estate ;
- e. Pengembangan kapasitas pengelolaan destinasi dalam kawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Mendorong tumbuhnya berbagai atraksi dan akomodasi berbasis masyarakat;
- g. Peningkatan kualitas dan jangkauan pemasaran pariwisata terutama ke pasar potensial dalam bentuk paket wisata sesuai jenis wisata;
- h. Peningkatan jumlah dan kualitas sarana promosi konvensional maupun media *on-line* (pemanfaatan teknologi informasi terbaru);
- i. Penyusunan segmentasi pasar wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- j. Peningkatan Profesional Pelayanan Kepariwisata melalui sertifikasi kompetensi.

Selanjutnya dari berbagai strategi yang ada dilakukan analisis untuk melakukan penataan lingkungan internal dan eksternal dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Penataan Lingkungan Internal (Kekuatan)

1.1. LINGKUNGAN FISIK DAYA TARIK

- a. Kekayaan nilai budaya daerah yang bersumber pada keaneka ragaman suku, etnis, adat istiadat dan kekayaan nilai budaya lainnya menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan pariwisata berbasis Seni budaya (multikultural, pluralisme)
- b. Berbagai keragaman seni dan budaya ada yang menjadi daya tarik internasional seperti Pasola, Kampung Megalitik (Bena, Sumba, Boti)
- c. Terdapat berbagai jenis situs dan artefak sejarah/budaya yang sangat menarik sebagai obyek wisata.
- d. Pengembangan pariwisata berbasis industri ekonomi kreatif masyarakat baik di perdesaan dan perkotaan.
- e. Wilayah lautan yang luas dan garis pantai yang relatif panjang merupakan potensi alam yang sangat bagus bagi pengembangan wisata bahari;
- f. Beberapa obyek wisata seperti Komodo (Manggarai Barat), Taman Laut Riung (Ngada), Gunung Kelimutu (Ende), Sao Wisata (Sikka), Pantai Nemberala (Rote) telah menjadi referensi wisata andalan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik;
- g. Wilayah pegunungan dan lembah dengan tingkat kecuraman yang tajam sangat potensial sebagai obyek rekreasi alam, terutama kegiatan panjat tebing (hiking);
- h. Letak geografis yang strategis sangat memungkinkan masuknya wisatawan asing baik melalui Bali dan NTB maupun langsung dari Australia dan Timor Leste;
- i. Iklim tropis yang dominan sangat menguntungkan bagi pengembangan pertanian, kehutanan, peternakan dan pariwisata.

1.2. SARANA PENUNJANG

- a. Pertumbuhan unit hotel serta kapasitas kamar cukup baik;
- b. Pertumbuhan unit usaha restoran/rumah makan cukup baik;
- c. Pertumbuhan unit usaha biro perjalanan cukup baik;
- d. Lembaga-lembaga keuangan bank telah menyebar dengan baik pada semua kota di NTT;

- e. Jasa-jasa Persewaan Lainnya juga menunjukkan perkembangan yang baik.

1.3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Tenaga kerja produktif sangat dominan dalam struktur ketenagakerjaan di NTT;
- b. Minat tenaga kerja produktif untuk memasuki sektor kepariwisataan cukup baik;
- c. Upaya-upaya pembinaan SDM kepariwisataan oleh pemerintah maupun swasta telah dilakukan dalam batas-batas tertentu.

1.4. INSTITUSI DAN KEBIJAKAN

- a. Secara Nasional telah tersedianya standar, pedoman teknis, criteria dan prosedur pengelolaan Kepariwisataaan.
- b. Pada tingkat pemerintahan telah dibentuk berbagai kelembagaan di bidang kepariwisataan;
- c. Berbagai jenis pendidikan formal di bidang kepariwisataan telah tumbuh dan berkembang dengan baik;
- d. Di tingkat masyarakat juga telah berkembang berbagai kelompok seni dan budaya yang bergerak di bidang kepariwisataan.
- e. Unit usaha ekonomi yang mengelola kegiatan kepariwisataan telah berkembang cukup baik.
- f. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjadi acuan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan secara lebih baik lagi.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025;.
- h. Meningkatnya kerjasama antar daerah terutama dalam kegiatan promosi kepariwisataan

2. Penataan Lingkungan Internal (Kelemahan)

2.1. LINGKUNGAN FISIK DAN OBYEK/DAYA TARIK

- a. Belum maksimalnya kegiatan aktualisasi seni dan budaya;
- b. Banyak wilayah pantai yang tidak terawat sehingga tidak menarik sebagai obyek wisata;

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang destruktif peledak cenderung merusak biota laut/terumbu karang. Hal ini dapat merusak keindahan wilayah laut sebagai obyek wisata;
- d. Promosi wisata tentang obyek-obyek wisata tersebut belum dilakukan secara intensif dan terpadu, sehingga belum optimal dalam menarik wisatawan;
- e. Infrastruktur penunjang pada kawasan pegunungan dan lembah belum tersedia sehingga pemanfaatan sumberdaya alam ini sebagai obyek wisata belum dilakukan;
- f. Letak geografis yang strategis tersebut belum diikuti dengan penyediaan infrastruktur perhubungan, terutama perhubungan udara yang memadai, sehingga membatasi mobilitas para wisatawan;
- j. Iklim tropis yang relatif panjang tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena kurang berkembangnya penyelenggaraan berbagai event wisata.

2.2. SARANA PENUNJANG

- a. Jumlah unit usaha hotel yang berkembang adalah hotel kelas Non Bintang dengan layanan/sarana penunjang yang masih terbatas;
- b. Kerjasama antar biro perjalanan lokal dengan biro perjalanan yang lebih besar di kota-kota lain untuk kepentingan kepariwisataan belum berkembang;
- c. Belum dilakukannya pelaksanaan standarisasi usaha kepariwisataan secara baik (klasisifikasi, dll);
- d. Standarisasi jasa-jasa persewaan belum dilakukan dengan baik sehingga para pengguna jasa persewaan tidak mendapatkan kepastian harga dan kualitas layanan.

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

- a. Tenaga-tenaga produktif yang banyak jumlahnya pada umumnya berpendidikan rendah;
- b. Tenaga kerja produktif yang terlibat di dalam kegiatan kepariwisataan pada umumnya tidak dibekali dengan keterampilan profesional yang memadai;
- c. Upaya-upaya pembinaan yang dilaksanakan belum ditunjang dengan sistem pendidikan dan sarana penunjang yang memadai.

2.4. INSTITUSI DAN KEBIJAKAN

- a. Belum tampak sinergi yang kuat antar berbagai kelembagaan pemerintah di bidang kepariwisataan;
- b. Masih belum optimalnya implementasi pembangunan berwawasan kebudayaan karena ketidakmampuan mengadopsi budaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*). Lajunya pembangunan ekonomi yang kurang diimbangi oleh pembangunan karakter bangsa telah mengakibatkan krisis budaya yang selanjutnya memperlemah ketahanan budaya;
- c. Masih belum optimalnya implementasi etika kehidupan berbangsa. Kebanggaan atas jati diri bangsa sebagai identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang cenderung negatif;
- d. Kurang tersosialisasinya standar, pedoman teknis, prosedur dan kriteria pengelolaan kebudayaan karena kurangnya sumber daya di daerah;
- e. Belum terdapat koordinasi yang baik dikalangan institusi kemasyarakatan di bidang kepariwisataan;
- f. Dukungan sarana/prasarana dan pembiayaan yang dimiliki institusi kemasyarakatan di bidang kepariwisataan masih terbatas;
- g. Unit usaha ekonomi yang ada beroperasi secara parsial tanpa dukungan jaringan usaha yang memadai;
- h. Implementasi kerjasama antar daerah belum dilaksanakan secara optimal;
- i. Belum efektifnya upaya pemasaran baik di dalam maupun luar negeri termasuk terbatasnya sarana/materi promosi.

3. Penataan Lingkungan Eksternal (Peluang)

3.1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) memberi peluang yang sangat besar bagi pengembangan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Kementerian Pariwisata RI telah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 Destinasi Unggulan.

3.2. PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

- a. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak positif terhadap ketahanan budaya dengan adanya akulturasi budaya yaitu ciri khas dan identitas kebudayaan semakin berkembang;
- b. Demokratisasi membuka kesempatan yang besar bagi seniman dan budayawan dalam menciptakan karya seni dan perfilman;
- c. Meningkatnya penghargaan (dunia maupun nasional) terhadap potensi destinasi dan seni budaya daerah;
- d. Pemerintahan yang makin stabil akan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang;
- e. Penetapan hari libur nasional dan cuti bersama akan meningkatkan keinginan untuk berwisata (meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara);
- f. Secara global perekonomian bertumbuh dengan cukup baik, sehingga permintaan terhadap jasa kepariwisataan terus meningkat;
- g. Secara nasional pertumbuhan ekonomi juga cukup baik sehingga permintaan domestik terhadap jasa kepariwisataan juga meningkat;
- h. Minat wisatawan asing ke Indonesia meningkat;
- i. Investasi di bidang kepariwisataan memiliki rate of return dan earning power yang relatif tinggi, sehingga menarik minat bagi investor asing maupun dalam negeri.

3.3. PERKEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI

- a. Jaringan transportasi dan komunikasi global, nasional dan domestik yang semakin baik mengakibatkan aksesibilitas wisatawan asing maupun domestik ke berbagai obyek wisata di NTT semakin meningkat;
- b. Jaringan transportasi darat telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar kota semakin membaik;
- c. Jaringan transportasi laut telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar pulau semakin baik;

- d. Jaringan transportasi udara telah terbangun dengan baik sehingga aksesibilitas antar kota di dalam maupun ke luar propinsi semakin baik;
- e. Jaringan telekomunikasi, terutama jaringan telepon seluler telah menjangkau semua kota di NTT.

3.4. LINGKUNGAN SOSIAL

- a. Keragaman budaya yang tinggi mengandung kearifan-kearifan lokal dan daya tarik bagi wisatawan;
- b. Nilai-nilai kekeluargaan yang berkembang di dalam relasi-relasi sosial masyarakat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk menarik minat wisatawan;
- c. Sifat keramah tamahan masyarakat merupakan nilai tambah yang berguna untuk menarik minat wisatawan;
- d. Kelembagaan sosial budaya yang bervariasi memiliki fungsi-fungsi laten yang dapat dikembangkan untuk menunjang pengembangan aktivitas kepariwisataan;
- e. Ragam aktivitas sosial budaya dan ekonomi seperti upacara adat serta kegiatan seni dan budaya serta kegiatan-kegiatan produktif masyarakat dapat dikembangkan menjadi bagian dari kegiatan kepariwisataan yang menarik.

3.5. KEAMANAN DALAM NEGERI

- a. Upaya-upaya pemerintah untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif terus dilakukan secara optimal;
- b. Terdapat komitmen yang kuat dari aparat keamanan untuk menjamin keamanan terutama bagi wisatawan;
- c. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif juga terus meningkat.

4. Analisis Lingkungan Eksternal (Ancaman)

4.1. PERKEMBANGAN NASIONAL DAN GLOBAL

- a. Masih kurangnya penghargaan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang memunculkan penjiplakan serta pembajakan hasil karya seni budaya masyarakat;
- b. Kurangnya perhatian pengelolaan keragaman budaya dapat menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa;

- c. Pengaruh budaya asing dalam era globalisasi akan berdampak negatif terhadap ketahanan budaya seperti kemungkinan terjadinya erosi ciri khas dan identitas nilai budaya;
 - d. Pertumbuhan ekonomi global relatif tinggi tetapi sangat fluktuatif, sehingga mengandung ketidakpastian yang sangat tinggi;
 - e. Perkembangan industri kepariwisataan di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara relatif pesat. Hal ini menciptakan persaingan yang sangat ketat bagi kepariwisataan di Indonesia;
 - f. Kemampuan penawaran jasa kepariwisataan pada tingkat regional NTT relatif terbatas. Hal ini dapat mengalihkan permintaan wisman ke tempat lain;
 - g. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat lokal akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan berpotensi timbulnya konflik sosial;
 - h. Penyediaan infrastruktur kepariwisataan yang relatif lamban dapat mengalihkan minat investor ke daerah lain;
 - i. Ketidaksiapan masyarakat untuk terbuka terhadap perkembangan kepariwisataan dapat menghambat peningkatan investasi di bidang kepariwisataan;
 - j. Masing-masing daerah juga berupaya menjadikan sektor kepariwisataan sebagai sektor andalan.
- 4.2. PERKEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI
- a. Kontinuitas layanan transportasi darat belum memadai dan pada bagian-bagian tertentu kondisi infrastruktur (jalan) belum memadai;
 - b. Kontinuitas layanan transportasi laut belum memadai;
 - c. Kontinuitas layanan transportasi udara belum memadai;
 - d. Jaringan telekomunikasi non seluler masih terbatas.
- 4.3. LINGKUNGAN SOSIAL
- a. Keragaman budaya dan kearifan lokal yang ada belum dikembangkan untuk kepentingan kepariwisataan;
 - b. Nilai-nilai kekeluargaan dan relasi-relasi sosial yang berkembang belum menciptakan perilaku ekonomi yang kondusif bagi kepariwisataan;

- c. Upaya-upaya untuk mengembangkan fungsi ekonomi dari kelembagaan sosial budaya yang ada belum dilaksanakan secara optimal;
 - d. Manajemen pertunjukkan belum berkembang dengan baik mengakibatkan upacara adat dan kegiatan seni budaya yang berkembang belum memberi dampak ekonomis yang berarti bagi masyarakat.
- 4.4. KEAMANAN DALAM NEGERI
- a. Koordinasi Pemerintah dengan Aparatur Keamanan belum berjalan secara maksimal sehingga peristiwa peledakan bom pada tempat-tempat umum masih sering terjadi.

5.2. KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pernyataan dan komitmen yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan rumusan strategi untuk pencapaian tujuan. Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan di atas maka kebijakan pencapaiannya adalah :

- a. Mendorong terlaksananya kegiatan pentas seni dan budaya sebagai bentuk menjadikan budaya sebagai modal pengembangan pariwisata;
- b. Melakukan inventarisasi potensi event budaya sebagai atraksi wisata dan penetapan skala event (*core*, *major* dan *supporting*) baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kab/kota;
- c. Penataan dan penetapan kebijakan perencanaan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- d. Melakukan inventarisasi potensi kawasan wisata untuk ditetapkan sebagai destinasi unggulan baik tingkat provinsi maupun kab/kota;
- e. Melakukan inventarisasi berbagai atraksi wisata untuk kemudian ditetapkan skala event baik *core*, *major* maupun *supporting event* baik pada tingkat kab/kota maupun tingkat provinsi;
- f. Melakukan inventarisasi berbagai industri ekonomi kreatif di masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan dalam rangka pemetaan dan pengembangan untuk menunjang pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif;
- g. Mendorong terlaksananya berbagai atraksi wisata sebagai hiburan dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat dalam penjualan dan pemasaran produk usaha ekonomi kreatif;

- h. Mendorong terciptanya pelayanan administrasi dan pembinaan usaha kepariwisataan agar terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- i. Penataan dan pengadaan model/format pembinaan bagi pelaku usaha kepariwisataan;
- j. Pelaksanaan kegiatan promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di samping pelaksanaan strategi promosi yang konvensional;
- k. Penataan sistem penyediaan sarana dan informasi kepariwisataan yang lebih komprehensif;
- l. Melakukan pengkajian/survey kecenderungan wisatawan sebagai acuan strategi promosi;
- m. Pelaksanaan standarisasi pelayanan pariwisata berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- n. Peningkatan koordinasi antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam upaya membangun kebudayaan dan kepariwisataan daerah;
- o. Mendorong dan memberi kesempatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan kepariwisataan;
- p. Pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat terutama bagi masyarakat di sekitar daya tarik wisata;
- q. Mendorong terciptanya pembudayaan Sapta Pesona dan masyarakat sadar wisata;
- r. Pengembangan profesionalisme tenaga kerja sektor kepariwisataan dalam memberikan pelayanan prima bagi wisatawan;
- s. Penataan tatalaksana dan mekanisme pelayanan publik sektor kebudayaan dan pariwisata;
- t. Pengembangan kinerja organisasi dinas dalam rangka penguatan kelembagaan.

Sinergitas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2021-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan	Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, ammenitas dan atraksi di Kawasan PE;	<p>Pembangunan Kawasan destinasi Pengembangan <i>'ring of beauty'</i> melalui penguatan destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam. • Pembangunan daya tarik wisata <p>Pembangunan infrastruktur pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan secara bertahap dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem sekitar, pengelolaan destinasi dan ekraf berbasis masyarakat 2. Pemenuhan fasilitas umum dalam kawasan sebagai akses dasar dan wadah penjualan produk local masyarakat sekitar destinasi 3. Peningkatan pelatihan lanjutan yang mengarah kepada pemenuhan sertifikat profesi bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan pengembangan daya Tarik destinasi wisata berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif terhadap keseluruhan destinasi yang tersedia diwilayah NTT dan nasional. Melakukan kerjasama dalam rangka promosi kepada <i>influencer</i> dan penggiat social media dalam mengenalkan destinasi wisata dan pemasaran produk ekraf 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kerjasama antar daerah dan pelaku bisnis dalam pengelolaan dan peningkatan amenities, akomodasi dan atraksi kawasan destinasi 2. Pengembangan pemasaran dan pengembangan atraksi buatan dan inovasi 3. Pemasaran usaha ekonomi kreatif ke pasar nasional dan pasar global

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		<p>dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata. peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. <p>Pembangunan SDM Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. <p>Pengembangan Investasi pariwisata</p>	<p>4. Pengembangan POKDARWIS dan BUMDes dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata, pengembangan dan kerjasama dengan pelaku bisnis pariwisata dan meningkatkan kualitas destinasi dan produk IKM dan UMKM</p> <p>5. Penguatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan dan sertifikasi profesi usaha pariwisata dan produk ekonomi kreatif</p> <p>6. Koordinasi dalam menggali gagasan kerjasama antar pelaku bisnis pariwisata, lembaga pendidikan, asosiasi dan badan pengembangan pariwisata daerah</p>		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai. <p>Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi. 			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. 			
	Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	<p>Pengembangan Investasi pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan paket wisata antar destinasi 2. Peningkatan kualitas produk IKM/UMKM ekonomi kreatif 3. Penggagasan kerjasama antar provinsi NTB, Bali dan Jawa Timur sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 4. Pengagasan kerjasama Indonesia dan Timor Leste terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan paket wisata antar destinasi 2. Pengembangan pasar produk IKM/UMKM ekonmi kreatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan paket wisata antar destinasi 2. Pengembangan inovasi dan reatifitas produk IKM/UMKM

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		memadai.	pariwisata		
	Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep <i>Ring of Beauty</i> ;	<p>1. Penguatan <i>value chain</i> kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan industri kepariwisataan. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor antara (pengolahan) untuk meningkatkan nilai tambah. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hilir untuk meningkatkan nilai transaksi dengan wisatawan. • Pengembangan jaringan bisnis untuk menyatukan pelaku ekonomi (hulu-antara-hilir) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk kuliner, hasil kerajinan dan produk industri lainnya yang dapat diproduksi di sekitar lokasi destinasi wisata 2. Fasilitasi hak paten usaha dan produk ekonomi kreatif berbasis lokal 3. Pengembangan industri IKM/UMKM dalam rantai produksi, distribusi dan pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atraksi pada lokasi wisata secara terencana dan terjadwal 2. Kolaborasi industry pariwisata dan industri ekonomi kreatif dalam lokasi Pariwisata Estate 	Kerjasama antar destinasi menjadi paket-paket wisata <i>ring of beauty</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		<p>sehingga terbentuk value chain kepariwisataan yang solid dan dinamis.</p> <p>2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. • Pengembangan atraksi wisata interaktif untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan pada semua destinasi pariwisata. • Penerapan sistem pembayaran elektronik pada semua outlet kepariwisataan 			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		untuk mempermudah transaksi wisatawan.			
	Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat; Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;	Pembangunan Ekonomi Kreatif. Peningkatan jumlah usaha dan produk di bidang Ekonomi Kreatif	Sertifikasi usaha dan produk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Sertifikasi usaha dan produk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Sertifikasi usaha dan produk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
Industri pariwisata menjadi sektor unggulan	Meningkatnya Kunjungan wisatawan Mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan 	1. Promosi digital dan penyiapan pusat informasi pariwisata dan produk ekonomi	1. Pemanfaatan produk local pertanian, perikanan dan perkebunan oleh	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya		Pengembangan Ekonomi Kreatif. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 	kreatif 2. Standarisasi produk local dalam industri pariwisata	pelaku industri pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan wisatawan Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. • Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media 	1. Peningkatan paket wisata dalam daerah dan nusantara 2. Promosi destinasi antar daerah 3. Kerjasama pelaku bisnis pariwisata nusantara	1. Peningkatan paket wisata dalam daerah dan nusantara 2. Promosi destinasi antar daerah 3. Kerjasama pelaku bisnis pariwisata nusantara	1. Peningkatan paket wisata dalam daerah dan nusantara 2. Promosi destinasi antar daerah 3. Kerjasama pelaku bisnis pariwisata nusantara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		Sosial.			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. • Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial. 	Promosi dalam daerah dan luar daerah	Promosi dalam daerah dan luar daerah	Promosi dalam daerah dan luar daerah
	Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. • Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media 	Kerjasama media cetak, media televisi dan media online dalam mempromosikan destinasi unggulan	Kerjasama media cetak, media televisi dan media online dalam mempromosikan destinasi unggulan Kerjasama promosi paket wisata Pariwisata Estate	Kerjasama media cetak, media televisi dan media online dalam mempromosikan destinasi unggulan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
		Cetak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial.			
	Terwujudkan strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT	Penguatan data dan analisa pemasaran pariwisata dan tren wisatawan	Kajian-kajian dan penelitian	Kajian-kajian dan penelitian	Kajian-kajian dan penelitian
Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata;	Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan lanjutan dan standarisasi kompetensi	Sertifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pelaku profesi pariwisata	Sertifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pelaku profesi pariwisata	Sertifikasi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pelaku profesi pariwisata
	Terwujudnya kerjasama antar kemitraan, antar wilayah dan lintas		Pengautan manajemen kelembagaan pengelolaan destinasi melalui POKDARWIS yang	Kerjasama POKDARWIS, BUMDes dan Pelaku bisnis pariwisata dan ekonomi kreatif	Kerjasama POKDARWIS antar wilayah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		
			2021	2022	2023
	sektor dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif		berintegrasi bersama BUMDes dan Desa		
	Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;		Sertifikasi HAKI dan Standarisasi usaha pelaku ekonomi kreatif	Sertifikasi HAKI dan Standarisasi usaha pelaku ekonomi kreatif	Sertifikasi HAKI dan Standarisasi usaha pelaku ekonomi kreatif

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam penyusunan Program dan Kegiatan urusan pariwisata dan ekonomi kreatif berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan menkompilasi tujuan, sasaran dan strategi yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya maka ditentukan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan dapat menjawab visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan asumsi pagu pendanaan sebagaimana digambarkan dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.

Struktur organisasi Perangkat Daerah terdistribusi dalam empat program yang dilaksanakan oleh empat bidang dan dua belas sub bidang sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

- i. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi;
- ii. Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi;
- iii. Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi;
- iv. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi.

2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

- i. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- ii. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- iii. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- iv. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- v. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- vi. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- vii. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi

- i. Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - ii. Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - iii. Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - iv. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - v. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - vi. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
 - vii. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- i. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - ii. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota;
 - iii. Pengelolaan Investasi Pariwisata.

2. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

- 1) Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- i. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
 - ii. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi;
 - iii. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri;
 - iv. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Layanan Penyediaan
- i. Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
 - ii. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar;
 - iii. Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif;

- iv. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar;
 - v. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula.
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
- i. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
 - ii. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - iii. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Tingkat Lanjutan;
 - iv. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
 - v. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA);
 - vi. Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/*Recognition Current Competencies* (RCC);
 - vii. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata;
 - viii. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif;
 - ix. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya melaksanakan tugas untuk mewujudkan Misi Kedua Perubahan RPJMD NTT 2018-2023 yaitu “Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*Ring of Beauty*). Keterkaitan antara program yang dilaksanakan dengan tujuan, sasaran dan strategi dalam mewujudkan Misi kedua sesuai arahan Perubahan RPJMD NTT 2018-2023 tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1. berikut:

Tabel. 6.1. Keterkaitan Program dan Upaya Mewujudkan Misi Kedua

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
Mewujudkan Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Ekonomi Daerah (<i>prime mover</i>)	(Tujuan PD 1) Mewujudkan pembangunan pariwisata kolaboratif melibatkan semua sektor pendukung, lintas pemangku kepentingan	Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT Melalui Pemenuhan Unsur 5 A Pariwisata (<i>attraction, accessibility, accommodation, amenities, awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	(Sasaran PD 1) Terpenuhinya standar pelayanan pariwisata dalam destinasi dalam kawasan pariwisata strategis provinsi yang menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi masyarakat terutama dalam pemenuhan akomodasi, ammenitas dan atraksi di Kawasan PE;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Perwilayahan Destinasi Pariwisata; 2. Pembangunan Daya Tarik Wisata; 3. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata; 4. Pemberdayaan Kelembagaan dan Masyarakat melalui Kepariwisataan; 5. Pembangunan SDM Pariwisata; 6. Pengembangan Investasi Pariwisata. 	Pembangunan Kawasan destinasi Pengembangan 'ring of beauty' melalui penguatan destinasi Pariwisata baru di 22 Kabupaten/Kota dalam konsep Pariwisata Estate yang berbasis masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan terutama Tradisional dan Alam; • Pembangunan daya tarik wisata Pembangunan infrastruktur pariwisata; <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sarana prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pariwisata. peluang - peluang yang menguntungkan secara ekonomi; 	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
					<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata.; • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat; • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. 	
					Pembangunan SDM Pariwisata <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah SDM di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat melalui kepariwisataan <ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tentang peran dan fungsi, manfaat pariwisata guna merangsang pemanfaatan peluang - peluang yang 	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
					<p>menguntungkan secara ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan peraturan yang berpihak pada peningkatan mutu Pelayanan Pariwisata dan Kelestarian Lingkungan Wisata. • Pengelolaan Pariwisata yang berbasis masyarakat setempat. • Pemerataan arus wisata bagi semua daerah tujuan wisata yang ada di NTT. 	
					<p>Pengembangan Investasi pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen-komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai. 	<p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI</p>

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
			<p>(Sasaran PD 2) Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;</p>		<p>Pengembangan Investasi pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama antar penyelenggara pariwisata seperti Agen Biro Perjalanan, Pengusaha Jasa Akomodasi dan komponen – komponen terkait lainnya. • Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pengolahan secara profesional dan mutu pelayanan yang memadai. 	<p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI</p>
		<p>Meningkatnya Sumbangan Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah</p>	<p>(Sasaran PD 3) Terbentuknya paket wisata antar destinasi wisata dalam konsep Ring of Beauty;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Value Chain Kepariwisataaan; 2. Peningkatan Jumlah Kunjungan, Lama tinggal dan Belanja Wisatawan 	<p>1. Penguatan value chain kepariwisataan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu sebagai pemasok bahan baku bagi kebutuhan industri kepariwisataan. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor antara (pengolahan) untuk meningkatkan nilai tambah. • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hilir untuk meningkatkan nilai 	<p>Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI</p>

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
					<p>transaksi dengan wisatawan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan jaringan bisnis untuk menyatukan pelaku ekonomi (hulu-antara-hilir) sehingga terbentuk value chain kepariwisataan yang solid dan dinamis. 	
					<p>2. Peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan belanja wisatawan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. • Pengembangan atraksi wisata interaktif untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan. • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan pada semua destinasi pariwisata. • Penerapan sistem pembayaran elektronik pada semua outlet kepariwisataan untuk mempermudah transaksi 	<p>1. Program Pemasaran Pariwisata;</p> <p>2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI.</p>

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
					wisatawan.	
			<p>(Sasaran PD 4) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif lokal masyarakat; Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata;</p>		<p>Pembangunan Ekonomi Kreatif. Peningkatan jumlah usaha dan produk di bidang Ekonomi Kreatif</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
	<p>(Tujuan PD 2) Industri pariwisata menjadi sektor unggulan penggerak ekonomi sektor-sektor lainnya</p>		<p>(Sasaran PD 5) 1. Meningkatnya Kunjungan wisatawan Mancanegara; 2. Meningkatnya Kunjungan wisatawan Nusantara; 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi serta jangkauan</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui Promosi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif. • Peningkatan Promosi yang dilakukan secara beragam melalui Media Elektronik dan Media Cetak dengan memanfaatkan kemajuan 	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p>

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
			<p>promosi dan pemasaran pariwisata destinasi wisata unggulan dan produk ekonomi kreatif daerah;</p> <p>4. Bertambahnya paket wisata dalam kawasan strategis pariwisata, antar pulau dan antar provinsi.</p>		<p>teknologi dan pengembangan pemanfaatan Media Sosial.</p>	
			<p>(Sasaran PD 6) Terwujudkan strategi pemasaran yang kompetibel berdasarkan data riset terhadap kecenderungan wisatawan yang berkunjung ke wilayah NTT</p>		<p>Penguatan data dan analisa pemasaran pariwisata dan tren wisatawan</p>	<p>Program Pemasaran Pariwisata</p>
	<p>(Tujuan PD 3) Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata</p>		<p>(Sasaran PD 7) Terwujudnya pelayanan kepariwisataan yang profesional lewat standarisasi profesi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif</p>		<p>Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata melalui pelatihan lanjutan dan standarisasi kompetensi</p>	<p>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</p>
			<p>(Sasaran PD 8) Terwujudnya kerjasama</p>			<p>Program Pengembangan</p>

Tujuan RPJMD	Tujuan PD	Sasaran RPJMD	Sasaran PD	Strategi RPJMD	Strategi PD	Program
			antar kemitraan, antar wilayah dan lintas sektor dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif			Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			(Sasaran PD 9) Meningkatnya profesionalisme pelaku bisnis pariwisata dan terpenuhi standarisasi produk dan usaha ekonomi kreatif local masyarakat;Berjalannya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menyediakan pelayanan pariwisata			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI

Sumber: Perubahan RPJMD NTT 2018-2023

Indikator masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan memiliki indikator target kinerja dan kelompok sasaran sehingga dapat dilakukan pengukuran atas prestasi pencapaian kinerja organisasi, secara lengkap disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
				Indikator Sasaran:Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	0.75	0.76%		0.77%		0.78%		0.78%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
		3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	31,808,626	100%	59,985,298	100%	34,763,953	100%	Sub Bagian Umum, Sub Bagian PDE dan Sub Bagian Keuangan	
		3.26.01.1.01	Kegiatan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11 laporan	11 laporan	777,005	11 laporan	890,000	11 laporan	856,648	11 laporan	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
		3.26.01.1.01.01	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kab/kota se-NTT	3 laporan	3 laporan	297,477	2 Kegiatan	140,000	3 laporan	327,968	3 laporan	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja dan Rapat Koordinasi Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota se NTT											

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.01.02	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	49,818	1 Kegiatan	60,000	1 Dokumen	54,924	1 Dokumen	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
		3.26.01.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19,714	1 Kegiatan	25,000	1 Dokumen	21,735	1 Dokumen	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
		3.26.01.1.01.04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	24,937	1 Kegiatan	40,000	1 Dokumen	27,493	1 Dokumen	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan DPA-SKPD											
		3.26.01.1.01.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19,925	1 Kegiatan	25,000	1 Dokumen	21,967	1 Dokumen	Sub Bagian PDE	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
		3.26.01.1.01.06	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22 laporan	22 laporan	54,153	3 Kegiatan	50,000	22 laporan	59,704	22 laporan	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bulanan, Penyusunan buku database pariwisata & Ekraf, Penyusunan laporan pencapaian pariwisata estate											
		3.26.01.1.01.07	Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	310,981	4 Kegiatan	250,000	1 Dokumen	342,857	1 Dokumen	Sub Bagian PDE	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan, Lakip, LPPD, LKPJ, Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											
		3.26.01.1.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	8,240,313	100%	12,93,360	100%	9,953,264	100%	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.02.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	8,077,382	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	9,773,632	12 Bulan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		3.26.01.1.02.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	-	0	12 Bulan	11,360	12 Bulan	10,834	12 Bulan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
		3.26.01.1.02.03	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya bahan pelaksanaan verifikasi	12 Bulan	12 Bulan	9,827	12 Bulan	12,000	12 Bulan	10,834	12 Bulan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
		3.26.01.1.02.04	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	9,991.000	12 Bulan	20,000	12 Bulan	22,040	12 Bulan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD											

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.02.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	19,997	1 Dokumen	20,000	1 Dokumen	22,047	1 Dokumen	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		3.26.01.1.02.06	Sub Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahantanggapan pemeriksa	12 Bulan	12 Bulan	3,119.000	9 Lokasi	100,000	12 Bulan	91,639	12 Bulan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
		3.26.01.1.02.07	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Laporan	12 Laporan	9,997.000	12 Laporan	30,000	12 Laporan	33,072	12 Laporan	Sub Bagian Keuangan	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											
		3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12 Bulan	10,000	100%	10,000	100%	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.03.06	Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Bulan	10,000	100%	10,000	100%	Sub Bagian Umum	Kota Kupang	
			Aktivitas Kegiatan: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
		3.26.01.1.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi SDM ASN Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	100%	100%	133,786	100%	104,500	100%	147,499	100%	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
		3.26.01.1.05.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	12 Bulan			12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya untuk tenaga keamanan											
		3.26.01.1.05.03	Sub Kegiatan : Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Tersedianya Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Bulan			12 Bulan	37,500	12 Bulan	30,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
		3.26.01.1.05.04	Sub Kegiatan : Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Tersedianya Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 Bulan			12 Bulan	12,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											
		3.26.01.1.05.05	Sub Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Bulan			12 Bulan	10,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
		3.26.01.1.05.10	Sub Kegiatan: Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	12 Bulan			12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan											
		3.26.01.1.05.11	Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	92,750	12 Bulan	15,000	12 Bulan	15,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Perundang-Undangan											
			Aktivitas Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan											
		3.26.01.1.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	475,655	12 Bulan	507,000	12 Bulan	524,410	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
		3.26.01.1.06.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	33,362	12 Bulan	5,000	12 Bulan	36,782	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
		3.26.01.1.06.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	213,155	12 Bulan	200,000	12 Bulan	235,003	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		3.26.01.1.06.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		0	12 Bulan	10,000	12 Bulan	16,630	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		3.26.01.1.06.05	Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	15,084	12 Bulan	12,000	12 Bulan	16,630	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											
		3.26.01.1.06.06	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	13,478	12 Bulan	15,000	12 Bulan	14,859	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
		3.26.01.1.06.07	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan /material kantor	12 Bulan	12 Bulan	30,095	12 Bulan	25,000	12 Bulan	33,180	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material											
		3.26.01.1.06.08	Sub Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	12 Bulan	29,430	12 Bulan	35,000	12 Bulan	32,447	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Fasilitas Kunjungan Tamu											

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.06.09	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	141,051	12 Bulan	150,000	12 Bulan	155,509	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		3.26.01.1.06.10	Sub Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Bulan			12 Bulan	5,000	12 Bulan	5,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											
		3.26.01.1.06.11	Sub Kegiatan: Dukuingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan			12 Bulan	50,000	12 Bulan	50,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pengelolaan dan Pengendalian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan pada SKPD											
		3.26.01.1.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,219,903	12 Bulan	1,206,000	12 Bulan	1,344,943	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.08.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	11,340	12 Bulan	6,000	12 Bulan	12,502	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
		3.26.01.1.08.02	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	191,808	12 Bulan	200,000	12 Bulan	211,468	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		3.26.01.1.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,016,755	12 Bulan	1,000,000	12 Bulan	1,120,972	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		3.26.01.1.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	196,685	100%	197,000	100%	216,845	100%	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.01.1.09.01	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	54,985	12 Bulan	60,000	12 Bulan	60,621	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
		3.26.01.1.09.05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	12 Bulan			12 Bulan	2,000	12 Bulan	2,000	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pemeliharaan Mebel											
		3.26.01.1.09.06	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	11,700	12 Bulan	15,000	12 Bulan	12,899	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		3.26.01.1.09.09	Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	130,000	12 Bulan	120,000	12 Bulan	143,325	12 Bulan	Sub Bagian Umum	Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
Tujuan PD 1	Sasaran PD 1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada Destinasi Pariwisata yang mendapatkan program peningkatan	0%	32.38%	7,938,031	42.27%	25,505,279	56.67%	26,000,000	56.67%	Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.02	Kegiatan: Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemenuhan Akomodasi Amenitas dan Atraksi pada lokasi Pariwisata Estate	0 Kawasan	2 Kawasan	5,563,178	10 Kawasan	25,294,095	10 Kawasan	20,000,000	24 Kawasan	Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.02.02	Sub Kegiatan : Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Perencanaan terarah dan terukur			300,000		0			6 Kawasan	Bidang Destinasi Pariwisata	TTS, Sabu Raijua, Malaka
		3.26.02.1.02.03	Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikembangkan (Desa Wisata)		29.17%	323,885	79.17%	0	100%			Bidang Destinasi Pariwisata	Manggarai Barat
		3.26.02.1.02.04	Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pemenuhan Akomodasi dan amenitas			4,939,293	12 Unit	23,404,210	12 Paket	24,000,000	24 Unit	Bidang Destinasi Pariwisata	Ende, Manggarai, Rote Ndao, Kota Kupang.

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Pembangunan Akomodasi dan Amenitas Pariwisata Estate Waerebo dan Kellaba Madja	Jumlah unit akomodasi yang dibangun/dikembangkan			2 unit	5,000,000	-				Manggarai, Sabu Raijua	
			Aktivitas Kegiatan: Pembangunan Kolam Renang di Desa Oetuke Kolbano	Jumlah unit kolam renang yang dibangun			1 unit	250,000	-				TTS	
			Aktivitas Kegiatan: Pemenuhan Amenitas Pariwisata Estate	Jumlah unit amenitas yang dibangun			8 Unit	17,654,210	8 Unit					
			Aktivitas Kegiatan: Pengadaan Jet Sky untuk Desa Oetuke Kolbano	Jumlah Jet Sky yang diadakan			2 Unit	500,000	-				TTS	
		3.26.02.1.02.05	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen laporan monev	24 Kawasan	0 Kawasan	11 Lokasi	500,000	11 Lokasi	500,000	24 Lokasi	Bidang Destinasi Pariwisata	Kab. Kupang, Alor, Lembata, Ende, TTS, Sumba Timur, Rotendao, Manggarai, Manggarai Barat, Sabu Raijua	
			Aktivitas Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen laporan monev			11 Lokasi	500,000	11 Lokasi					

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.02.1.02.06	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Pariwisata Provinsi	Fasilitasi pengembangan seni budaya	10 Kawasan	0 Kawasan		10 Lokasi	1,389,885	10 Lokasi	1,500,000	24 Kawasan		Mulut Seribu, Fatumnasi, Liman, Koanara, Lamalera, Wolwal, Praimadita, Waerebo, Oeseli, Kellaba Madja
			Aktivitas Kegiatan: Fasilitasi Pengembangan Seni Budaya	Jumlah sanggar seni budaya yang dikembangkan				10 Sanggar Seni Budaya	1,389,885	10 Sanggar Seni Budaya				
		3.26.02.1.03	Kegiatan: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		0 Kawasan	2 Kawasan	2,374,853	7 Kawasan	211,183	8 Kawasan	200,000	24 Kawasan	Bidang Destinasi Pariwisata	
		3.26.02.1.03.02	Sub Kegiatan: Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				999,999		0		0		Bidang Destinasi Pariwisata	22 kab/kota
		3.26.02.1.03.04	Sub Kegiatan: Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				0	1 Paket	50,000		0		Bidang Destinasi Pariwisata	Kota Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Portal Gate Lasiana	Jumlah portal gate yang dibangun				1 Paket	50,000	-				

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.02.1.03.06	Sub Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				1,374,854	1 Kegiatan	161.183	1 Kegiatan	200.000		Bidang Destinasi Pariwisata	Alor, Kab. Kupang, Lembata, Manggarai, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang, Rotendao, Sabu Raijua, Malaka
			Aktivitas Kegiatan: Sunday Lasiana Beach	Jumlah jenis pagelaran seni dan budaya				1 Jenis pagelaran/12 kali panas	161,183	1 Jenis pagelaran/12 kali panas				
Tujuan PD 1 Tujuan PD 2	Sasaran PD 3 Sasaran PD 5 Sasaran PD 6	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	32.38%	32.38%	4,604,841	42.27%	4,224,023	56.67%	2,998,972	56.67%	Bidang Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.1.01	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pameran dan Promosi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4,604,841	10 Kegiatan	4,224,023	10 Kegiatan	2,998,972	30 Kegiatan	Bidang Pemasaran Pariwisata	
		3.26.03.1.01.01	Sub Kegiatan: Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				739,077	2 Kegiatan	727.065	2 Kegiatan	1,000,000	2 Kegiatan	Bidang Pemasaran Pariwisata	Manggarai, Kota Kupang, Sabu rajjua, malaka
			Aktivitas Kegiatan: Pameran Fotografi dan Video Pariwisata	Tersedianya dokumentasi daya tarik wisata dalam bentuk foto dan video sebanyak ± 250 buah				40 Foto dan Video Daya Tarik Wisata NTT	477,065	50 Foto dan Video Daya Tarik Wisata NTT				Kota Kupang

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Publikasi PromosiPariwisata	Tersedianya bahan promosi pariwisata dan Ekraf NTT berupa buku sebanyak 350 buah			48 Publikasi	250,000	60 Publikasi				Kota Kupang	
		3.26.03.1.0 1.02	Sub Kegiatan: Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			2,423,267	2 Kegiatan	1.446.957	2 Kegiatan	1,500,000	2 Kegiatan	Bidang Pemasaran Pariwisata	Sumba Barat, Sumba Timur, TTS, SBD, Sumba Tengah, Kota Kupang	
			Aktivitas Kegiatan: Festival Exotic NTT	Jumlah dan jenis pagelaran seni dan budaya yang difestivalkan		-	-	5 pagelaran	1,056,094	9 pagelaran			7 PE + Sarai dan Manggarai	
			Aktivitas Kegiatan: Festival Musim Dingin Fatunausus - Fatumnasi	Jumlah dan jenis pagelaran seni dan budaya yang difestivalkan		1 jenis pagelaran	362,683	1 pagelaran	390,863	1 pagelaran			Desa Fatukoto Kec. Mollo Utara Kab. TTS	
		3.26.03.1.0 1.03	Sub Kegiatan: Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			138,296	3 Kegiatan	1,700,000	3 Kegiatan	1,800,000	2 Kegiatan	Bidang Pemasaran Pariwisata	Alor, Belu, Ende, Sikka, Sumba Timur, Manggarai Barat, SBD	
			Aktivitas Kegiatan: Official Tour Book Tourism	Tersedianya Tour Book Tourism berbentuk aplikasi		-	-	1 Dokumen	1,000,000	-			Kota Kupang	
			Aktivitas Kegiatan: Pengembangan Pasar Regional	Jumlah lokasi pasar regional yang dikembangkan		-	-	2 Lokasi	200,000	2 Lokasi				
			Aktivitas Kegiatan: TIC	Tersedianya konten informasi berupa aplikasi		-	-	1 TIC	500,000	-				

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.03.1.0 1.04	Sub Kegiatan: Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			-	1,304,201	2 Kegiatan	350.000	2 Kegiatan	500,000	2 Kegiatan	Bidang Pemasaran Pariwisata	Alor, Ende, Kab. Kupang
			Aktivitas Kegiatan: Pameran Kemitraan Pariwisata	Jumlah nasional pameran yang diikuti		-	-	2 Pameran	250,000	2 Pameran				
			Aktivitas Kegiatan: Pameran Potensi Pariwisata	Jumlah pameran yang diadakan		-	-	4 Pameran	100,000	4 Pameran				
Tujuan PD 1 Tujuan PD 3	Sasaran PD 1 Sasaran PD 2 Sasaran PD 3 Sasaran PD 9	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Hak Paten (HKI)		1.50%	3,884,679	5.00%	8,391,858	10.00%	9,248,182	10.00%	Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	
		3.26.04.1.01	Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Cakupan Produk Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan dari penggunaan yang tidak Sah	0%	93.75%	3,884,679	93.75%	3,727,809	100%	6,248,182	100%	Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	
		3.26.04.1.01. 01	Sub Kegiatan: Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			-	-	2 Kegiatan	2,227,809	2 Kegiatan	4,000,000		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	Kota Kupang, Manggarai Barat
			Aktivitas Kegiatan: Exotic NTT Award	Penilaian usaha pariwisata pada sektor usaha jasa akomodasi dan jasa makanan dan minuman		-	-	365 usaha akomodasi dan 2148 usaha makanan	405,423	1 Kegiatan				

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
								dan minuman						
			Aktivitas Kegiatan: Festival Orang Kreatif	Jumlah festival yang diadakan	-	-	3 Festival	1,822,386	3 Festival					
		3.26.04.1.01.02	Sub Kegiatan: Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik			2,087,764	2 Kegiatan	1,500,000	2 Kegiatan	1,600,000		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang, Rotendao	
			Aktivitas Kegiatan: Exotic EKRAF Festival	Jumlah produk EKRAF yang dipromosikan	-	-	200 Pelaku UKM Ekraf / 40 Produk EKRAF	1,000,000	200 Pelaku UKM Ekraf / 40 Produk EKRAF					
			Aktivitas Kegiatan: Kerjasama Jaringan Pemasaran Karya Kreatif melalui media online	Jumlah karya kreatif yang dipasarkan melalui media online	-	-	20 Produk	500,000	20 Produk / 60 Pelaku EKRAF					
		3.26.04.1.01.03	Sub Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		-	1,163,491		-	-			Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Timur, TTS, Kota Kupang, Rotendao	

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.04.1.01.05	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula			-	633,424	-	-	-		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	Alor, Flotim, Sumba Timur, Kota Kupang	
		3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						3,164,049	5,000,000		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf		
		3.26.04.1.02.01	Sub Kegiatan: Pengembangan Riset					1 Kegiatan	500,000	400 Orang	500,000	Bidang Industri Pariwisata & Ekraf		
			Aktivitas Kegiatan: Penyusunan Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah naskah yang disusun				1 Naskah	500,000	-				
			Aktivitas Kegiatan: Sosialisasi Perda Pengembangan Ekraf	Jumlah Peserta Sosialisasi				-	-	400 orang				
		3.26.04.1.02.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Infrastruktur							-		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf		
			Aktivitas Kegiatan: Pembangunan dan Revitalisasi Lokabinkra tahap II	Jumlah gedung yang dibangun										
		3.26.04.1.02.06	Sub Kegiatan: Pemberian Insentif			-	-	4 Kegiatan	1,463,773	4 Kegiatan	1,500,000	Bidang Industri Pariwisata & Ekraf		

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Bantuan alat pengelolaan sampah plastik menjadi produk tepat guna di Pariwisata Estate	Jumlah alat pengolah sampah		-	-	10 Alat Pengolah Sampah	400,773	10 Alat Pengolah Sampah				
			Aktivitas Kegiatan: Bantuan alat sablon di Pariwisata Estate	Jumlah barang sablon		-	-	10 Barang Sablon	719,000	10 Alat Pengolah Sampah				
			Aktivitas Kegiatan: Hibah Bantuan Desain Produk untuk 5 Produk Ekraf di NTT	Jumlah bantuan hibah desain produk		-	-	5 Desain Produk	125,000	5 Desain Produk				
			Aktivitas Kegiatan: Pemberian Bantuan Alat Barista Kopi NTT	Jumlah alat barista kopi		-	-	10 Alat Barista Kopi	219,000	10 Alat Barista Kopi				
		3.26.04.1.02.07	Sub Kegiatan: Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah usaha dan produk terfasilitasi HKI		-	-	2 Kegiatan	700,000	2 Kegiatan	700,000		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	
			Aktivitas Kegiatan: Fasilitasi Pendaftaran 5 Produk Ekraf untuk Mendapatkan HAKI	Jumlah produk ekraf yang didaftar HAKI		-	-	5 Produk Ekraf	200,000	10 Produk Ekraf				
			Aktivitas Kegiatan: Sosialisasi dan Workshop Pendampingan Pembuatan Dokumen HKI	Jumlah pelaku ekraf yang teredukasi HKI dan usaha/produk ekraf yang terdaftar dokumen HKI		-	-	75 Orang pelaku dan produk ekraf	500,000	75 Orang pelaku dan produk ekraf				

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.04.1.02.10	Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			-	-	8 Lokasi	500,276	16 Lokasi	800,000		Bidang Industri Pariwisata & Ekraf	
			Aktivitas Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan CHSE dan TDUP	Jumlah usaha pariwisata yang bersertifikat CHSE		-	-	80 usaha pariwisata	500,276	80 usaha pariwisata				
Tujuan PD 1 Tujuan PD 3	Sasaran PD 1 Sasaran PD 4 Sasaran PD 7 Sasaran PD 8	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Cakupan Ketersediaan SDM Pariwisata bersertifikasi menurut jenis keahliannya:	0	-	4,287,406	-	5,823,977	-	7,000,000		Bidang Kelembagaan Pariwisata	
		3.26.05.1.01	Kegiatan: Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pelatihan lanjutan	10 Pelatihan	10 Pelatihan	4,287,406	12 Pelatihan	4,410,819	12 Pelatihan	5,000,000	40 Pelatihan	Bidang Kelembagaan Pariwisata	
		3.26.05.1.01.01	Sub Kegiatan: Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang dilatih dan disertifikasi			1,719,795	220 Orang	1,428,183	250 Orang	1,500,000		Bidang Kelembagaan Pariwisata	Alor, Ende, Lembata, Kota Kupang, Rote Ndao
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan Kompetensi dan Sertifikasi SDM Pariwisata Sub Sektor Pengelola Spa	Jumlah pengelola spa yang dilatih dan disertifikasi				20 orang pengelola spa	504,553	-				

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Pelaku Usaha Perjalanan	Jumlah pelaku usaha perjalanan yang dilatih dan disertifikasi			200 orang pengelola	923,630	-					
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor akomodasi, kuliner dan pramuwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dilatih			-	-	300 orang pelaku usaha pariwisata					
		3.26.05.1.01.02	Sub Kegiatan: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terbentuknya POKDARWIS pada Kawasan Pariwisata Estate (Target 24 Pokdarwis di Tahun 2023)		29.17 (7 Kelompok)	2,202,954	10 Kelompok	1,288,367	14 Kelompok	1,800,000		Bidang Kelembagaan Pariwisata	Kab. Kupang, TTS, Kota Kupang, Manggarai Barat
			Aktivitas Kegiatan: Pendampingan Pengelolaan Pariwisata Estate	Jumlah pengelola pariwisata estate yang didampingi		-	-	10 orang pengelola estate	400,000	10 orang pengelola estate				
			Aktivitas Kegiatan: Penguatan Kapasitas Kelompok Sadar Wisata	Jumlah anggota kelompok sadar wisata yang dilatih				270 orang anggota kelompok sadar wisata	888,367	280 orang anggota kelompok sadar wisata				
		3.26.05.1.01.03	Sub Kegiatan : Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah tenaga kerja kepariwisataan yang mengikuti pelatihan tingkat lanjutan		50 Orang pengelola homestay	115,429	120 Orang	529,464	120 Orang	600,000		Bidang Kelembagaan Pariwisata	Alor, Ende, Kab. Kupang, Lembata, Sumba Timur, TTS, Rotendao

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Pengelola Homestay	Jumlah pengelola homestay yang mengikuti pelatihan tingkat lanjutan			120 orang pengelola home stay							
		3.26.05.1.01.04	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				150 Orang	830,694	450 Orang	2,700,000				
				a. Tour operator		29.17	122,620	79.17		100	100	Bidang Kelembagaan Pariwisata	Kota Kupang	
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Tour Operator	Jumlah tour operator yang disertifikasi	0	0	33% (8 Lokasi)		100%	700,000				
				b. Guide/Pemandu Wisata		29.17	122,620	79.17		100	100			
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Guide	Jumlah guide yang disertifikasi	100 Orang	319,009	0	0	175 Orang	700,000				
				c. Pelaku Ekonomi Kreatif		29.17	122,620	79.17		100	100			
				d. Restaurant		29.17	122,620	79.17		100	100			
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Pelaku Usaha Restoran	Jumlah pengelola restoran yang disertifikasi	100 Orang	268,988	0	0	100 Orang	350,000				
				e. Perhotelan		29.17	122,620	79.17		100	100			
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata Sub Sektor Akomodasi (Cottage)	Jumlah pengelola hotel yang disertifikasi	100 Orang	269,038	150 orang pengelola usaha akomodasi	830,694	175 orang pengella akomodasi	969,143				
				f. Pramuwisata		29.17	122,620	79.17		100	100			
				g. Transportasi		29.17	122,620	79.17		100	100			
				h. Informasi		29.17	122,620	79.17		100	100			

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
		3.26.05.1.01.05	Sub Kegiatan : Pelatihan Asesor Kompetensi/ workplace assessor (WPA)	Terlaksananya Pelatihan Asesor Kompetensi/ workplace assessor (WPA)			25 Orang	334,111	-	350,000	100	Bidang Kelembagaan Pariwisata	Kota Kupang	
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi dan Pelatihan Asesor Kompetensi Sektor Pramuwisata	Jumlah asesor yang disertifikasi			25 orang asesor pariwisata		-					
		3.26.05.1.02	Kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			0		1,413,157		1,500,000	10 Pelatihan	Bidang Kelembagaan Pariwisata		
		3.26.05.1.02.01	Sub Kegiatan: Pelatihan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			0	150 Orang	557,825	150 Orang	600,000	4 Pelatihan	Bidang Kelembagaan Pariwisata		
			Aktivitas Kegiatan: Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan	Jumlah sanggar pertunjukan yang mengikuti Bimtek			120 orang anggota sanggar pertunjukkan		120 orang anggota sanggar pertunjukkan					
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif Sub Sektor Barista	Jumlah orang kelompok Barista yang disertifikasi			30 orang anggota Barista		-					
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan SDM Ekraf Sektor Kriya	Jumlah orang kelompok kriya yang dilatih	0	0	0	0	210 Orang					
		3.26.05.1.02.02	Sub Kegiatan: Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			0	180 Orang	601,365	180 Orang	650,000	2 Pelatihan	Bidang Kelembagaan Pariwisata		

TUJUAN PD	SASARAN PD	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR MASA RENSTRA	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2021		2022		2023				
						TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)	TARGET	Rp(juta)			
			Aktivitas Kegiatan: Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Sektor Periklanan	Jumlah orang pelaku usaha pengolahan perikanan yang dilatih			180 orang pelaku usaha pengolahan perikanan		-					
		3.26.05.1.02.03	Sub Kegiatan: Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			0	60 Orang	253,967	60 Orang	250,000	2 Pelatihan	Bidang Kelembagaan Pariwisata		
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Arsitek	Jumlah arsitek pariwisata yang disertifikasi			30 orang arsitek pariwisata		-					
			Aktivitas Kegiatan: Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Sektor Fotografi	Jumlah fotografi pariwisata yang disertifikasi			30 orang fotografi pariwisata		-					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun sisa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada Urusan pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut ditampilkan dalam Tabel 7.1 .

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PERUBAHAN RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2023)
		TAHUN 2019	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentasi Pertumbuhan UMKM baru di Pariwisata Estate (%)	2	4	6	8	8
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	2, 71	4	4	4	4
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.057.384	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
4	Peningkatan Retribusi dari Hasil Pengelolaan Aset	563.092.000	600.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
5	Sertifikasi Tenaga Kepariwisata	-	300	300	300	900

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen rujukan atasnya seperti RPJMD, RPJPD, RTRW dan juga dokumen perencanaan di tingkat Pemerintah Pusat, diharapkan dokumen RENSTRA akan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2023 merupakan langkah penyesuaian terhadap hasil evaluasi pertengahan RPJMD dan revisi perda RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 khususnya pada urusan pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan tupoksi yang diemban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai indikator yang diperbaharui.

Untuk itu semua yang terkait (*stakeholders*) dalam pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata di provinsi ini, diharapkan untuk mampu memahami substansi RENSTRA Perubahan ini secara menyeluruh sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan tahunan selama periode 2021 – 2023. Hal ini penting untuk menghindari munculnya program kegiatan secara parsial dan tumpang tindih antar kegiatan dengan focus dan lokus yang harmonis.

Implementasi dari RENSTRA Perubahan ini juga menuntut adanya koordinasi lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kemitraan agar mendapat dukungan dari berbagai *pemangku kepentingan* bidang pariwisata. Sikap yang mengedepankan *ego* bagian harus dihilangkan agar terjadinya sinergi dalam suasana kebatinan yang harmonis. Pentingnya koordinasi ini juga harus dipahami dari sisi bagaimana menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam kondisi di mana kemampuan keuangan daerah relatif terbatas diperlukan kesadaran untuk menempatkan prioritas pembangunan pada kegiatan yang benar-benar berdampak langsung dan kuat bagi pengembangan pariwisata.

Pemahaman pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa terwujud pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD dan RENSTRA dibutuhkan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bumi FLOBAMORATA.

Kupang, 19 februari 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

Dr. Ir. WAYAN DARMAWA, MT

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.196205051986031041

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



8 VIKTOR SINGULU LAISKODAT



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

 **website : parekrafntt.id**

 **Instagram : [@disparekraf.ntt](https://www.instagram.com/disparekraf.ntt)**

 **Youtube : [Dinas Parekraf NTT](https://www.youtube.com/Dinas Parekraf NTT)**

 **Facebook : [Dinas Pariwisata Provinsi NTT](https://www.facebook.com/Dinas Pariwisata Provinsi NTT)**

 **Twitter : [@disparekrafNTT](https://twitter.com/disparekrafNTT)**

 **Email : parekraf@nttprov.go.id**



SCAN ME